

Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Brawijaya untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Sarjana Ilmu Politik



Disusun Oleh :

AISAH

145120501111025

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

JURUSAN PPHI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan

Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban

SKRIPSI

Disusun Oleh:

AISAH

NIM. 145120501111025

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama



Faqih Alfian, S.IP, M.IP
NIK. 2014058612161001

Pembimbing Pendamping



Resya Famelasari, S.Sos, M.Soc. Sc
NIK. 2016078805112001

**Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan
Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

AISAH

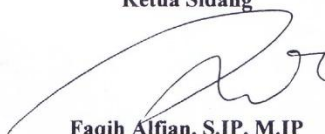
NIM. 145120501111025

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana

Pada Tanggal 24 September 2018

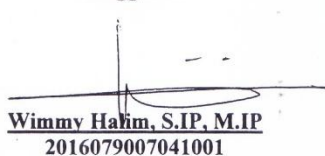
Tim Penguji

Ketua Sidang



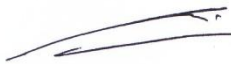
Faqih Alfian, S.IP, M.IP
NIK. 2014058612161001

Anggota 1



Wimby Hahim, S.IP, M.IP
2016079007041001

Sekretaris Sidang



Resva Famelasari, S.Sos, M.Soc, Sc
NIK. 2016078805112001

Anggota 2



Taufik Akbar, S.IP, M.IP
2014058511011001

Malang, 24 September 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Unti Ludigdo, AK
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN

Nama: AISAH

NIM: 145120501111025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *“Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban”* merupakan karya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 24 September 2018

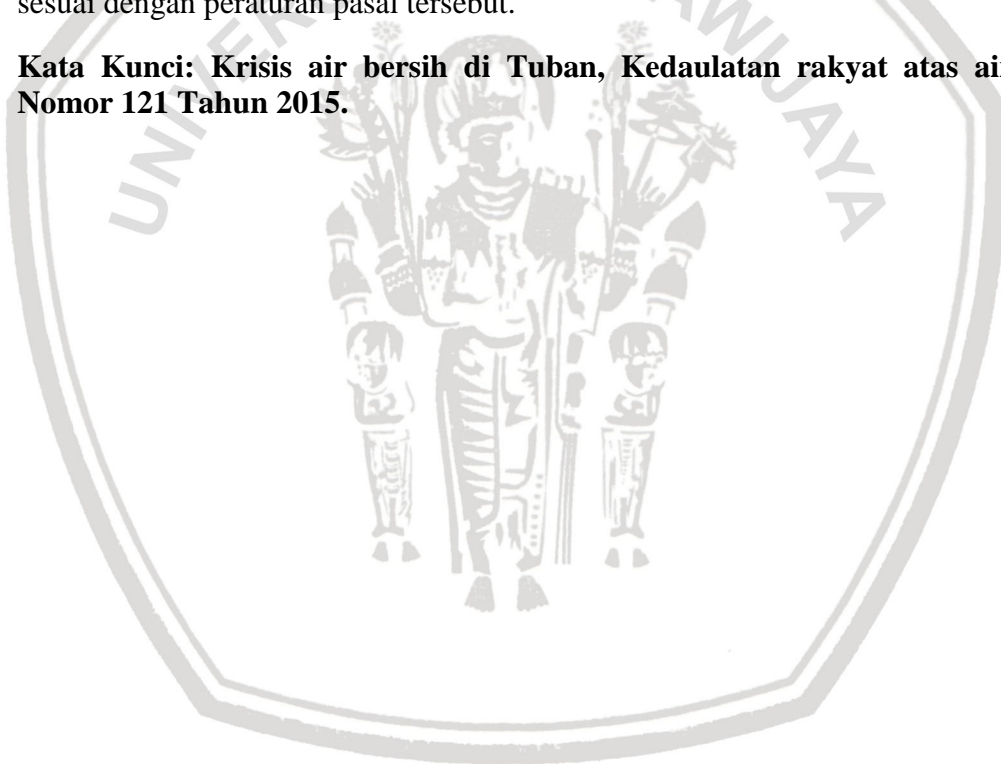
AISAH

NIM. 145120501111025

ABSTRAK

Kajian penelitian ini menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat atas air merupakan prinsip dari kandungan amanah PP Nomor 121 Tahun 2015, hal yang serupa juga disebutkan dalam PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengelolaan air bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori implmentasi kebijakan George C. Edwards yang menjelaskan bagaimana komunikasi antar birokrasi, wewenang pemerintah, dan sumber-sumber atau sumber daya. Hasil dari penelitian ini pemerintah daerah menyadari bahwa sumber daya air merupakan sektor yang memberikan dampak paling besar bagi pendapatan ekonomi masyarakat. Namun, kedaulatan rakyat atas air tidak terpenuhi karena adanya komunikasi birokrasi yang kurang harmonis yang menyebabkan penyampaian informasi terkait kebijakan antar birokrat tidak sampai pada masyarakat. Jaminan kedaulatan rakyat atas air juga terhambat pada pola perizinan di pasal 20 PP Nomor 121 Tahun 2015 yang tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan pasal tersebut.

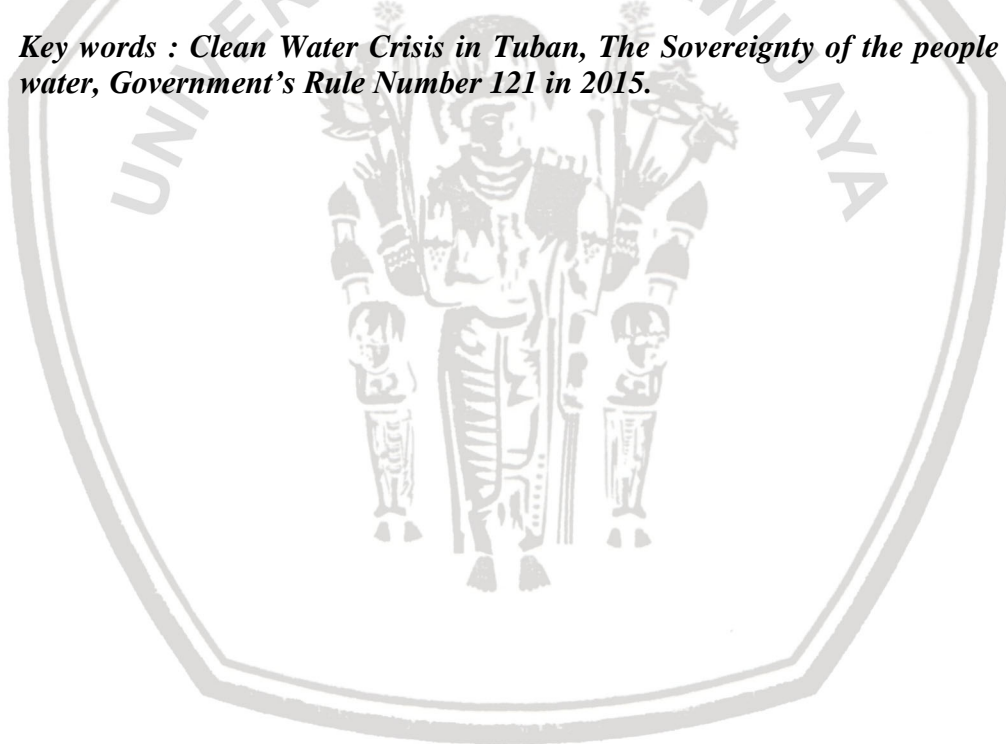
Kata Kunci: Krisis air bersih di Tuban, Kedaulatan rakyat atas air, PP Nomor 121 Tahun 2015.



ABSTRACT

This research is trying to explain that sovereignty of the people upon water as the part of Tuban's Government Rule Number 121 in 2015. There're similar things also mentioned in the Government Rules of Tuban City Number 13 in 2015 which is water management aims to fulfill the needs of the society. This research is using descriptive qualitative method and the theory of policy implementation by George C. Edwards that describe about how the communication between the bureaucracy, the government's authority, and the water resources or natural resources. The result of this research is local government realized that water resource constitute a sector that provides the greatest impact for the society's economic income. However, people's sovereignty over water are not really met due to a less bureaucratis communication that lead to the delivery of policy-related information between bureaucrats not to the community. The guarantee of people's sovereignty over water also hampered under the licensing patterns section 20 in the Government Rules of Tuban City Number 121 in 2015 which can't run in accordance with the article's regulations.

Key words : Clean Water Crisis in Tuban, The Sovereignty of the people upon water, Government's Rule Number 121 in 2015.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'alamin penulis ucapkan atas rahmat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan S-1 (Strata Satu) Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran dan persetujuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi kelancaran atas segalanya termasuk dalam berjalannya proses skripsi dari awal sampai selesai.
2. Kedua orangtua saya dan adik saya beserta keluarga besar saya yang telah mendo'akan dan memberi dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang serta Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si. selaku Ketua jurusan Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional (PPHI) Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Faqih Alfian, S.IP, M.IP. dan Ibu Resya Famelasari S.Sos, M.Soc, SC Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing,

membantu dan memberikan masukan yang membangun guna penyusunan skripsi ini sampai selesai.

5. Bapak Wimmy Halim, S.IP, M.IP dan Bapak Taufik Akbar, S.IP, M.IP selaku dosen penguji saya yang memberikan saran dan masukan terkait penulisan dan penyusunan skripsi guna kesempurnaan hasil tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik yang banyak membantu memberikan ilmunya selama kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Bagian administrasi prodi ilmu politik yang membantu melayani keperluan perkuliahan dan selama berjalannya skripsi.
7. Kepada Bapak Edi Santoso selaku Kabag. Perekonomian & Sumber Daya Alam di Tuban, Bapak Agus Selaku perwakilan PDAM Tirta Lestari Tuban, Bapak Hardi Sunoto Selaku perwakilan OPD Kab. Tuban yang terkena krisis air bersih, Bapak Wakis selaku perwakilan HIPPAMS Tuban yang terkena krisis air bersih dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan dalam berjalannya proses penelitian.
8. Kepada seluruh guru saya terutama pak Zainal Abidin dan Abdul Aziz yang mendo'akan muridnya untuk tetap semangat dalam berjalannya penyusunan skripsi hingga akhir.
9. Kepada saudara dan kerabat dekat pakde Tarsam, Om Nurrohman, keluarga Bani Saijo beserta keluarga Nguluhan yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan guna tercapainya pembelajaran dan skripsi.

10. Kepada seluruh sahabat saya Ayu Rizki Amalia, Faeruz Elyaq Anis, Yola Ayu E.K, Puji Astuti, Ernawati, Rahma Ainimmahya, Yuyun Priantini, Indra, Maklus, Nur Faizah serta teman-teman seperjuangan ilmu politik 2014 yang banyak membantu dan memotivasi satu sama lain di depan prodi dari pagi sampai sore.

11. Seluruh keluarga besar MANRE Malang yang membantu mendo'akan dan mendukung penulis untuk tidak berhenti berjuang menuntaskan skripsi, kawan-kawan HmI KISIP 2014 serta Kohati Kisip Brawijaya Malang beserta keluarga besar seUniversitas Brawijaya Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga skripsi ini dapat dijadikan informasi dan pengetahuan oleh pembaca. Penulis sadar dalam penulisan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dibutuhkan penulis untuk penulisan yang lebih sempurna dari sebelumnya.

Malang, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teoritis	12
2.1.1 Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.2 Kedaulatan Air	19
2.1.3 Konsep Pengusahaan Sumber Daya Air	21
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Metode Penelitian.....	31
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian	32

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Pemilihan Informan.....	35
3.6 Sumber Data.....	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.8 Validasi Data.....	40

BAB IV GAMBARAN UMUM SUMBER DAYA AIR DI TUBAN 41

4.1 Kondisi Demografi Dan Kebutuhan Air Bagi Masyarakat Tuban.....	41
4.2 Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban.....	50

BAB V HASIL PENELITIAN 59

5.1 Tata Kelola Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban	59
5.1.1 Institusi-Institusi Pengusahaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban	60
5.1.2 Kedaulatan Sumber Daya Air Masyarakat Kabupaten Tuban	63
5.2 Indikator Teori Implementasi Kebijakan Edwards Dalam Pengusahaan Sumber Daya Air Di kabupaten Tuban.....	69
5.2.1.Komunikasi Birokrasi Kabupaten Tuban Dalam Pengusahaan Sumber Daya Air.....	70
5.2.2. Wewenang Pemerintah Atas Sumber Daya Air di Kabupaten Tuban.....	77
5.2.3. Sumber-Sumber atau Sumber Daya	81
5.3 Analisis Implementasi PP No.121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.....	84
5.4 Alternatif Program Pengurangan Krisis Air Bersih Dan Pengusahaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban	89
BAB VI PENUTUP 91	
6.1 Kesimpulan	91
6.2 Rekomendasi	92
Daftar Pustaka..... 94	
Lampiran	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Tuban	3
---------------------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Nama luas wilayah setiap Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Tuban	51
Tabel 4.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tuban	53
Tabel 5.1 Penggunaan air bersih di Tuban	63
Tabel 5.2 pengelolaan sumber daya air di Tuban	66



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Peneliti	30
Bagan 5.1 Struktur hierarki pengusahaan sumber daya air di Tuban	62



DAFTAR ISTILAH

1. BPS : Badan Pusat Statistik
2. BPBD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
4. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
5. DLL : Dan Lain-Lain
6. DSB : Dan sebagainya
7. HIPPAMS : Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi
8. LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
9. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
10. PEMDA : Pemerintah Daerah
11. PERDA : Peraturan Daerah
12. OPD : Organisasi Perangkat Desa
13. SDA : Sumber Daya Air
14. SEKDA : Sekretaris Daerah
15. *Standard Operating Procedures* : SOP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alamnya. Diantara sumber daya alam yang ada, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang sering disebut dengan *renewable*, tidak dapat diperbarui (*non renewable*) dan sumber daya yang berbentuk modal alam (*natural resources stock*) seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir dsb, termasuk air. Air merupakan komponen utama dalam kehidupan makhluk hidup. Semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktifitas metabolisme mengambil tempat di larutan air¹.

Air merupakan sumber kehidupan manusia setelah oksigen. Kehilangan air untuk 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian yang diakibatkan oleh dehidrasi. Air di dalam tubuh manusia diperlukan untuk transportasi zat-zat makanan dalam bentuk larutan dan melarutkan berbagai jenis zat yang diperlukan tubuh². Air sendiri terbagi menjadi dua, yaitu air asin (laut) dan air tawar (sungai, sumur, danau dll). Air tawar digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat karena air tawar tidak memiliki kadar garam yang tinggi seperti air laut yang terasa asin, namun permasalahannya ketersediaan air tawar yang sehat, bersih dan aman dikonsumsi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di beberapa daerah tertentu, khususnya daerah yang letak

¹Samidjo, Jacobus. Pengelolaan Sumber Daya Air. Jurnal Vol : XXI, No : 1, Maret 2014 Hal 43.

²Kusuma, Debytho Airlangga. 2017 Skripsi “Ekologi Politik (Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Probolinggo) Malang, Universitas Brawijaya.

geografisnya berada di dataran tinggi, seperti Kecamatan Montong dan Grabagan di Kabupaten Tuban yang terletak 100 m dpl. Pengelolaan sumber daya air yang bijak sangat diperlukan untuk menganalisis terjadinya kekurangan air bersih bagi kehidupan masyarakat.

Penyebab terjadinya krisis air bersih di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: kebiasaan boros air, penambahan jumlah penduduk, tekanan lingkungan dan perilaku konsumtif, intrusi air laut, kerusakan sumber daya air, distribusi air kurang merata, dan pengelolaan air yang kurang optimal³. Cuaca dan iklim juga mempengaruhi tingkat volume air yang terdapat di bumi, semakin rendah curah hujan yang terjadi maka volume air akan semakin sedikit. Terjadinya krisis air bersih yang berkepanjangan akan mengakibatkan kekeringan pada suatu daerah.

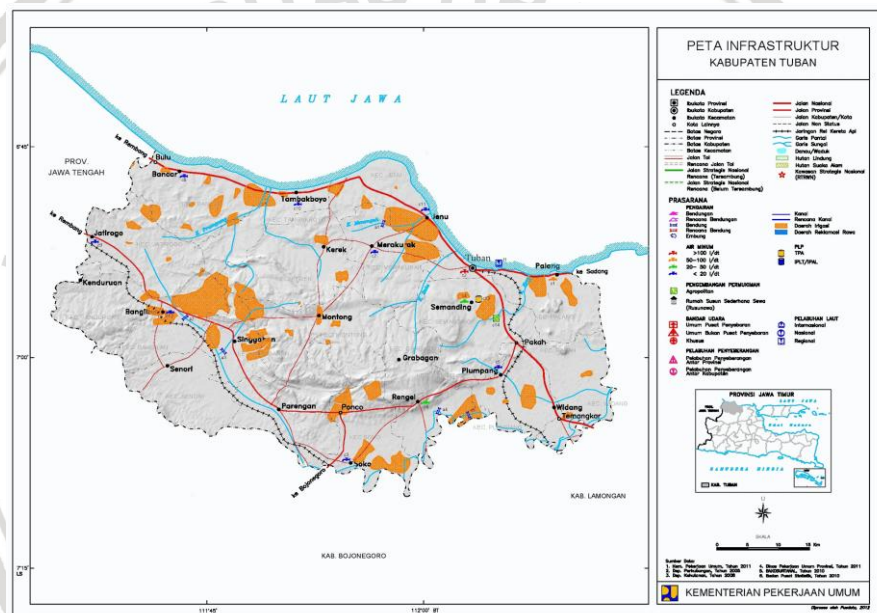
Permasalahan air menjadi semakin krusial, karena air merupakan kebutuhan vital makhluk hidup. Permasalahan air menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Tuban. Mulai dari banjir, kekeringan dan kekurangan jumlah air bersih yang tersedia. Wilayah Indonesia, menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik⁴. Krisis air bersih di Tuban menjadi permasalahan dari tahun ke tahun setiap kali jatuh musim

³Patrick <https://www.google.com/search?q=pattrik+http%3A%2F%2Ftanindo.net%2F2016%2F12%2F05%2Fpenyebab-krisis-air-bersih%2F+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-abdiakses> tanggal 20 Desember 2017.

⁴Novi Handayani. 2010. Studi Awal Tentang Sistem Penyediaan Air Bersih Di Desa Karangduwur Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Semarang. Universitas Negeri Semarang. Hal 1

kemarau, hal ini disebabkan oleh letak demografi di Kabupaten Tuban yang memiliki ketinggian berkisar antara 0-500 meter diatas permukaan laut (dpl). Bagian Utara dan Selatan Kabupaten Tuban berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut yang terdapat disekitar pantai dan sepanjang Sungai Bengawan Solo. Sedangkan daerah yang memiliki ketinggian di atas 100 meter terdapat di Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan ⁵.

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Tuban



Sumber : <https://www.google.co.id/search?safe=petatuban&gs>, 2018.

Melihat gambaran peta yang tertera, sebagian besar wilayah Tuban berupa daratan dengan kemiringan 0-2% di wilayah bagian barat, sedangkan untuk daerah bagian selatan wilayah berbukit dengan kemiringan rata-rata lebih dari 15% lebih tinggi dari pada daerah bagian barat. Secara fisik, Kota Tuban terletak diantara pantai yang suhu udaranya mencapai 25-27 derajat Celcius dengan iklim tropis

⁵ Draft Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tuban 2013 Hal II-1

kering⁶. Krisis air bersih yang melanda Kabupaten Tuban, tidak hanya terjadi di satu kecamatan atau dua kecamatan saja, namun di beberapa kecamatan yang tersebar di daerah Kabupaten Tuban. Terutama daerah yang terletak di dataran tinggi dan tidak terlintasi daerah aliran sungai. Hingga saat ini, terdapat 36 Desa tersebar di sembilan kecamatan yang mengalami krisis air bersih, dan bantuan air yang diberikan pemerintah terhadap daerah yang terkena krisis air bersih sebanyak 1,9 juta liter telah dikirimkan. Diantaranya di wilayah Kecamatan Rengel, Grabagan, Soko, Parengan, Montong, Semanding, dan Jatirogo⁷.

Sumber mata air bersih di Kabupaten Tuban rata-rata terletak pada daerah-daerah yang teraliri daerah aliran sungai atau daerah dataran rendah. Seperti yang digambarkan di peta Kabupaten Tuban diatas yang menggambarkan daerah-daerah yang sudah terpenuhi kebutuhan airnya maupun yang belum terpenuhi kebutuhan airnya. Untuk daerah dataran rendah seperti Merakurak yang banyak dialiri daerah aliran sungai dan banyak sumber mata air bersih, maka secara langsung daerah Merakurak dan sekitarnya tidak terkena dampak terkait sumber daya air. Sedangkan untuk daerah dataran tinggi seperti Kecamatan Montong, sumber mata air bersih yang paling besar selain dari sumur tanah adalah aliran mata air Kerawak yang terletak diperbatasan Desa Guwoterus Kecamatan Montong dan Kecamatan Singgahan, sehingga disekitar daerah ini masih terjadi krisis air bersih karena terkendala pemasok sumber mata air bersih.

⁶Draft Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tuban 2013 Hal II-1&2

⁷M. Yakub <http://mediaindonesia.com/news/read/127326/krisis-air-bersih-di-tuban-masih-berlangsung/2017-10-15> Diakses 20 Desember 2017

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam menyikapi permasalahan krisis air bersih di Kabupaten Tuban, seperti di Desa Nguluhan Kecamatan Montong dan daerah-daerah yang krisis air bersih seperti di Kecamatan Soko, Grabagan, Parengan, Bangilan, Semanding dan Jatirogo dengan *dropping* air bersih dan membuat tandon air untuk beberapa daerah yang mengalami kekeringan setiap tahun. Hingga saat ini untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi pemerintah kabupaten Tuban masih mengandalkan sistem *dropping* sampai musim hujan tiba.

Terjadinya krisis air bersih yang berkepanjangan di daerah Tuban mendapat tanggapan dari wakil rakyat. Pemerintah Kabupaten Tuban dinilai gagal mengatasi air kekeringan air bersih, karena daerah Tuban menjadi langganan krisis air bersih/kekeringan setiap musim kemarau. Program pemerintah dinilai lemah dalam penanggulangan dampak kekeringan air bersih di beberapa wilayah Tuban yang selalu dilanda krisis air bersih setiap tahun di musim kemarau oleh Cancoko, anggota dewan dari fraksi partai Demokrat⁸. Sistem *dropping* air bersih yang menjadi program andalan pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih harus dimaksimalkan untuk mengurangi jumlah daerah yang menjadi langganan krisis.

Dampak sosial dan ekonomi dari krisis air bersih yang terjadi di Kabupaten Tuban berimbas pada sistem pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Urgensinya air terhadap kehidupan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kehidupan bercocok tanam para petani

⁸RohmanHalnopantura.comTuban[https://www.halnopantura.com/langganan-musim-kemarau-pemkab-tuban-dinilai-gagal-atasi-kekeringan-air bersih/](https://www.halnopantura.com/langganan-musim-kemarau-pemkab-tuban-dinilai-gagal-atasi-kekeringan-air-bersih/) diakses 7 Januari 2018

di daerah dataran tinggi. Urgensi air di wilayah Kabupaten Tuban terutama di beberapa daerah dataran tinggi adalah sebagai berikut: a) Di sekitar pemukiman masyarakat tidak ada sumber mata air bersih yang besar, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang mayoritas beternak kambing dan sapi. b) Sumur-sumur yang terletak di sekitar sawah dan pemukiman masyarakat tidak semua bersih. Bahkan beberapa ada yang tidak bisa digunakan sebagai air minum, hal itu dikarenakan kadar air yang sedikit berbau lumpur. c) Tidak ada separo dari masyarakat membeli air bersih untuk minum, sebagian lagi mengambil air di sumur untuk mencuci baju, memberi minum hewan ternak dan mencuci perabotan rumah tangga. Hal itu dikarenakan penghasilan masyarakat yang tidak terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. d) Musim panen tanaman padi di daerah dataran tinggi hanya sekali dalam satu tahun. Sedangkan untuk padi jagung 2 kali, mengingat akan volume air yang sangat kurang. Ketergantungan bercocok tanam di daerah dataran tinggi sangat terpengaruhi dari volume air yang ada, karena di daerah dataran tinggi jauh dari daerah aliran sungai.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan tentang memaksimalkan penggunaan manfaat bumi dan air beserta kekayaan alam untuk kebutuhan negara. Pemerintah berwenang untuk mengusahakan sumber daya air di daerahnya masing-masing guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya. Selain dijelaskan dalam amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, Penjelasan tentang sumber daya air juga dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang

pengusahaan sumber daya air yang membahas penguasaan air oleh negara ditujukan untuk mengatur, mengolah dan mengurus perizinan serta batasan-batasan alokasi air untuk memenuhi hak setiap individu/personal agar mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari⁹.

Dalam PP No. 121 Tahun 2015 juga dijelaskan bahwa negara mempunyai wewenang tertinggi untuk mengusahakan sumber daya air. Penjelasan PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air meletakkan rakyat sebagai komponen utama dari dibuatnya peraturan tersebut, hal itu dikarenakan kesejahteraan hidup rakyat merupakan prioritas negara. BUMN/BUMD berhak mengatur rencana, program maupun izin-izin yang terkait dengan pengusahaan sumber daya air. Sesuai dengan isi PP No. 121 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh BUMD, selaku badan pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengelola air untuk masyarakat. PDAM Tirta Lestari menjadi BUMD yang memiliki wewenang paling tinggi untuk pengusahaan sumber daya air, hal ini diperkuat dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Tuban No. 13 Tahun 2015 tentang perusahaan daerah air minum “Tirta Lestari” Kabupaten Tuban yang menjelaskan bahwa maksud dari didirikannya PDAM Tirta Lestari termuat dalam Pasal 3 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial,

⁹PP Nomor 121 Tahun 2015

dan kesehatan dengan menyelenggarakan pengelolaan air minum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tuban¹⁰.

Jaminan kesejahteraan air untuk masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan daerah Kabupaten Tuban No.13 Tahun 2015 tidak serta merta tanpa alasan. Aspek ekonomi masyarakat Tuban bergantung pada terpenuhinya kebutuhan air, terutama di sektor pertanian yang menjadi sumbangsih terbesar untuk sebagian besar masyarakat Tuban guna meningkatkan taraf kebutuhan hidupnya. Penjelasan pada peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 disebutkan dalam Pasal 3 tersebut menjadi turunan dari PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola sumber daya air untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Adanya peraturan tentang sumber daya air yang termuat dalam Pasal 3 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 tersebut semakin memperkuat bahwa adanya peraturan yang disebutkan adalah untuk menopang kemajuan ekonomi masyarakat Tuban melalui pengelolaan air secara bijaksana dari pemerintah daerah untuk menjamin kebutuhan masyarakat atas air. Sehingga pemanfaatan fasilitas umum untuk masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak salah sasaran, seperti penjelasan peraturan daerah Kabupaten Tuban pasal 10 Nomor 5 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang jaminan hukum pemanfaatan

¹⁰ PERDA Kabupaten Tuban No. 13 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” Kabupaten Tuban Pasal 3.

fasilitas umum, termasuk pemanfaatan sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat¹¹.

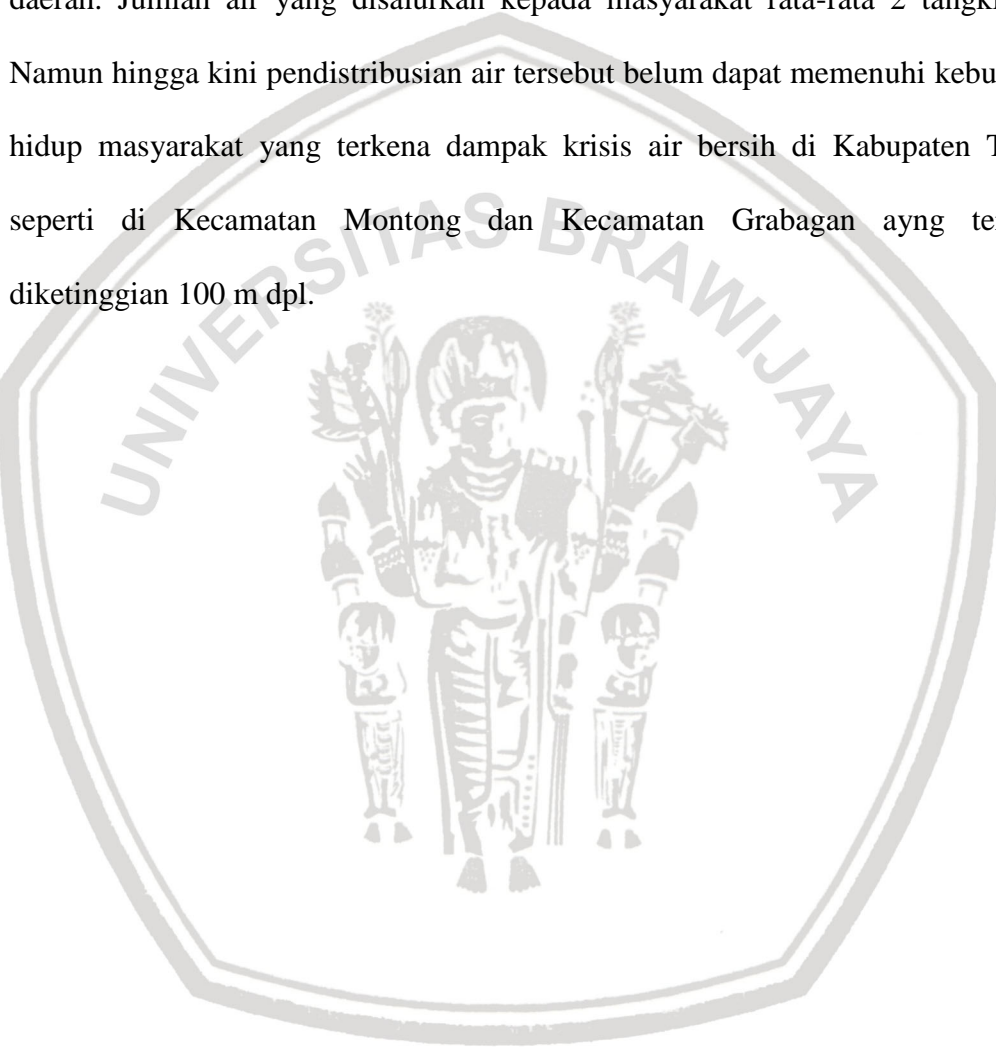
Pada pasal 5 PP Nomor 121 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam pengusahaan sumber daya air, terdapat rencana penyediaan air yang merupakan sekumpulan rangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk menyediakan air dan penggunaan sumber daya air sesuai kebutuhan. Seperti saluran air baku, yang terbuka atau tertutup (dalam bentuk pipa) pengeboran air tanah dll¹². Peraturan ini menjadi pijakan dasar setiap wilayah untuk mengusahakan sumber daya air sesuai dengan kebijakan yang akan diterapkan di daerahnya masing-masing, tak terkecuali Kabupaten Tuban. Selanjutnya dalam PP Nomor 121 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa salah satu prinsip dari peraturan pemerintah adalah mengizinkan pihak swasta melalui syarat-syarat tertentu, sehingga apabila negara/daerah melibatkan pihak swasta sudah dijamin dengan peraturan yang jelas dan mendasar. Pihak swasta disini menjadi prioritas terakhir dalam pengolahan sumber daya air setelah pemerintah dan negara yang memiliki hak mengatur sumber daya air secara utuh telah menyerahkan/mengizinkan wewenangnya kepada pihak swasta untuk pengusahaan sumber daya air.

Sistem *dropping* air menjadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun untuk mengatasi krisis air bersih di Tuban. Selain kerjasama yang dilakukan bersama PDAM dan OPD, sistem dropping air merupakan andalan pemerintah daerah untuk mengatasi krisis air bersih di

¹¹ Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017

¹² PP Nomor 121 Tahun 2015 Pasal 5

daerahnya. Kepala BPBD Joko Ludyono mengatakan ada 36 Desa di Tuban yang terkena dampak kemarau. Catatan terbaru ada 37 dusun di 7 Kecamatan yang mengajukan air bersih¹³. Dalam penyaluran air bersih BPBD Tuban bekerja sama dengan PDAM, OPD & HIP PAMS terkait permasalahan air di masing-masing daerah. Jumlah air yang disalurkan kepada masyarakat rata-rata 2 tangki/hari. Namun hingga kini pendistribusian air tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terkena dampak krisis air bersih di Kabupaten Tuban seperti di Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan ayng terletak diketinggian 100 m dpl.



¹³Kabartuban.comhttp://kabartuban.com/kemarau-krisis-air-bersih-tuban_masihberlanjut/19539
diakses pada tanggal 10 Januari 2018

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Menjamin Kedaulatan Masyarakat Atas Air Di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 sesuai dengan PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menjamin kebutuhan air masyarakat.
2. Mengetahui kinerja dan peran pemerintah dalam pengusahaan air bersih di Kabupaten Tuban dan mengetahui kebijakan apa yang akan diterapkan untuk memanajemen pengelolaan sumber daya air di Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Menjadi referensi baru terkait sudut pandang politik mengenai permasalahan krisis air bersih di Kabupaten Tuban
- b. Menambah wawasan intelektual tentang analisis fenomena lingkungan dengan menggunakan perspektif politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai evaluasi dan rekomendasi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam permasalahan mengatasi krisis air bersih dengan adanya PP Nomor 121 Tahun 2015 terkait pengusahaan sumber daya air.
- b. Sebagai referensi dan gambaran pemerintah dalam penerapan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Pelaksanaan penyelesaian penelitian tidak akan lengkap tanpa adanya teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjalankan penelitian. Teori dalam penelitian dapat menjadi acuan dasar dari keterkaitan pembahasan studi kasus penelitian dalam berbagai sudut pandang. Penggunaan teori dalam penelitian juga dapat digunakan untuk mendeteksi penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian dari perspektif studi apa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan implementasi kebijakan sebagai pijakan dari penelitian analisis studi kasus Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan air bersih di Kabupaten Tuban.

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan politik. Tujuan dari pembuatan sebuah kebijakan adalah untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada dengan alternatif pilihan yang kemudian diimplementasikan. Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan pembuatan kebijakan. Implementasi dapat dicirikan sebagai sebuah proses sederhana yang mengikuti arah atau petunjuk undang-undang yang berlaku, aturan administratif, perintah eksekutif maupun keputusan pengadilan¹. Implementasi juga dipandang secara luas atau secara menyeluruh yang menjelaskan tentang makna pelaksanaan undang-undang yang mana para aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk

¹John T Ishiyama & Marijke Breuning, Terjemahan Tribowo B.S Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad 21 Jilid 2 Cet 1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan maupun program-program dari kebijakan yang akan diterapkan². Menurut George C. Edwards III implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah dalam suatu kebijakan yang harus diatasi³. Dalam teorinya George C. Edwards III mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, variabel tersebut adalah sebagai berikut⁴:

1) Komunikasi

Komunikasi menjadi komponen vital dalam segala bidang, termasuk dalam implementasi kebijakan. Komunikasi dalam variabel implementasi kebijakan memiliki arti bahwa implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan mengetahui sasaran tujuan dari sebuah kebijakan yang akan diberlakukan sesuai dengan kondisi di masyarakat atau tidak. Pola komunikasi dan interaksi implementor dalam kondisi sosial suatu daerah menjadi *point* perhatian guna menerapkan kebijakan yang dijalankan dalam masyarakat. Edwards mengungkapkan bahwa dalam proses komunikasi, ada tiga komponen utama yang mendasarinya. Komponen tersebut adalah sebagai berikut⁵:

²Lester dan Stewart, Op. Cit. Hal 104. Dalam buku ² Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 134.

³Haedar, Akib. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No. 1 Tahun 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Dan Bagaimana. Hal 2. Universitas Makassar

⁴ Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 156.

⁵Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 156.

a) Transmisi

Implementor harus menyadari dan mengetahui bahwa sebelum dilaksanakannya kebijakan atau diberlakukannya sebuah kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat, keputusan-keputusan terkait rencana kebijakan yang akan diterapkan tersebut telah dibuat dan didasari dengan aturan perintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Transmisi berkaitan erat dengan kecepatan tanggapan seorang implementor dalam implementasi kebijakan untuk rakyat, hal ini diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik dalam berjalannya proses penerapan kebijakan. Seperti pertentangan pendapat antara implementor dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan dll.

b) Kejelasan

Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan faktor kedua yang mempengaruhi proses komunikasi yang baik. Landasan intruksi yang jelas harus dipenuhi dalam tahap ini, karena ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan oleh implementor maupun pembuat kebijakan dapat berimbas pada keberlanjutannya suatu kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa ketidakjelasan pola komunikasi dan pesan-pesan dalam komunikasi yang rancau akan memungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi yang salah.

⁶Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 158.

c) Konsistensi

Tahap ini merupakan hasil akhir dari tahap-tahap sebelumnya. Konsistensi komunikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan dapat berdampak pada kebijakan yang sedang diterapkan dalam masyarakat. Komunikasi yang efektif tidak akan tercapai tanpa adanya konsistensi pola komunikasi yang terjalin secara baik antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya atau Sumber-Sumber

Kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari sumber-sumber dan sumber daya yang ada. Konsistensi dan efektifitas dari komunikasi implementor tidak akan seimbang apabila sumber-sumber atau sumber daya tidak mencukupi atau tidak mendukung. Sumber daya disini tidak hanya berupa sumber daya manusia, namun juga sumber daya yang lain seperti sumber daya alam, sumber daya finansial dll. Dalam sebuah penerapan kebijakan, implementor tidak akan menerapkan kebijakan kepada suatu masyarakat tanpa melihat realitas sumber daya yang terdapat di wilayahnya. Implementor diharuskan mampu untuk memetakan kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan kapasitas sumber daya yang ada.

Sumber-sumber yang penting dalam implementasi kebijakan menurut Edwards adalah sebagai berikut⁷:

⁷Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 161.

a) Staf

Staf merupakan salah satu sumber terpenting dalam sebuah implementasi kebijakan. Ketrampilan dan kecekatan staf dalam mengelolan permasalahan dalam suatu kebijakan akan berdampak langsung pada pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Perekrutan staf dan semua yang berhubungan dengan pendanaan program dalam suatu kebijakan juga harus diperhatikan dalam pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk melancarkan proses berjalannya implementasi kebijakan.

b) Informasi

Luasnya pengetahuan informasi dalam suatu implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana cara pengaplikasian sebuah kebijakan yang akan diterapkan dan kelengkapan pengetahuan atas persiapan-persiapan terkait program-program kebijakan yang akan diterapkan. Informasi dalam tahap ini berguna untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru, kebijakan sebelumnya maupun kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan teknis.

c) Wewenang

Wewenang dapat menjadi batasan tindakan yang akan dilakukan. Wewenang dapat mendeskripsikan seberapa jauh wilayah kekuasaan pemerintah, implementor dan rakyat sendiri selaku pihak yang memiliki andil dalam *memonitoring* kinerja wakil rakyat yang mengemban amanah pemerintahan dalam suatu negara maupun daerah. Wewenang dapat berbentuk secara berbeda-beda antara program yang satu dengan program yang lain. misalkan wewenang dalam

hak mengeluarkan surat, pendanaan dsb. Edwards menjelaskan bahwa ada banyak pembatasan dalam penggunaan sebuah wewenang yang efektif. Namun, sanksi-sanksi yang mengikat tetap dapat memainkan peranan yang penting dalam proses berjalannya suatu kebijakan⁸.

Dalam sebuah implementasi kebijakan, implementasi menunjuk pada suatu tindakan atau kegiatan yang mengikuti pernyataan dari tujuan-tujuan sebuah program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Intinya dalam sebuah implementasi kebijakan, sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan harus mempunyai hasil atau perubahan yang diperoleh dari sebuah kebijakan yang dijalankan. Hal itu juga dibahas oleh Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy* yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas atau cara untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang diterapkan.

Terkait dengan pemikiran yang disampaikan oleh George C. Edwards III serta Riant Nugroho, landasan dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dapat dijadikan pemantik pemerintah daerah Kabupaten Tuban untuk penerapan kebijakan manajemen pengelolaan air bersih dan pendistribusian sumber daya air secara merata di wilayah Kabupaten Tuban. Sistem *dropping* air bersih yang sampai saat ini masih menjadi andalan utama upaya pemerintah dalam mengatasi krisis air

⁸Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 164.

bersih juga harus lebih dimasifkan dan ditingkankan intensitasnya karena sistem tersebut masih belum berhasil.

Dengan adanya PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air yang telah diberlakukan di Indonesia, peraturan ini dapat menjadi *standart* dasar atau tolak ukur dari keberhasilan atau tidaknya suatu peraturan yang akan diimplementasikan kepada rakyat dalam upaya memberikan kedaulatan air di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang terkena dampak krisis air bersih dan kurang optimalnya pengusahaan sumber daya air, terutama krisis air bersih yang saat ini terjadi setiap tahun pada musim kemarau di Kabupaten Tuban, khususnya daerah-daerah dataran tinggi diatas 100 m dpl.

Pondasi aturan yang ada dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 diturunkan dalam peraturan daerah yang termuat di peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menjelaskan peran pemerintah atau BUMD yang di peraturan tersebut diwakili oleh PDAM sebagai BUMD terkait dalam pengusahaan sumber daya air atau pengelola air di Kabupaten Tuban bertugas dan berwenang untuk mendistribusikan air secara bijaksana kepada masyarakat untuk memenuhi amanah setiap pasalnya yaitu menjamin kebutuhan masyarakat atas air, terutama air minum dan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari⁹.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015

2.1.2 Kedaulatan Air

Kedaulatan air adalah suatu kebebasan atau penguasaan untuk mengolah air sesuai dengan nilai guna yang ada. Air menjadi kebutuhan vital bagi makhluk hidup di muka bumi, khususnya manusia. Oleh sebab itu kedaulatan negara atas pengusahaan sumber daya air dijamin penuh dalam PP Nomor 121 Tahun 2015. Secara garis besar, negara memiliki wewenang utama atas pengelolaan air di negaranya. dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 disebutkan bahwa kedaulatan negara atas air rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat merupakan komponen utama yang harus didahulukan dalam pembagian sumber daya air.
- b. BUMN/BUMD memiliki wewenang penuh untuk mengatur pengusahaan sumber daya air. Hal itu termasuk semua yang berkaitan dengan izin, pengelolaan dan bagaimana cara manajemen sumber daya yang ada dengan baik. BUMN merupakan opsi pertama dalam pengusahaan air bersih, namun setelah wewenang dimandatkan kepada BUMD maka secara langsung BUMD berhak menerapkan kebijakan yang akan diterapkan untuk mengelola air di wilayahnya masing-masing.
- c. Swasta memiliki peran/andil dalam pengusahaan sumber daya air apabila mendapat mandat/izin dari BUMN/BUMD untuk membantu mengelola air sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku¹⁰.

Pasal 2 peraturan daerah Kabupaten Tuban No.5 Tahun 2017 menyebutkan bahwa adanya peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam

¹⁰PP Nomor 121 Tahun 2015

memanfaatkan fasilitas sosial bagi masyarakat¹¹ termasuk keperluan air bersih. Bersangkutan dengan penjelasan peraturan ini, dijelaskan dalam PP No.121 Tahun 2015 bahwa jaminan hukum pengelolaan air merupakan prinsip dari peraturan yang tertera.

Dalam konsep kedaulatan air yang dijelaskan dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan air bersih, rakyat menjadi komponen utama dari implementasi peraturan yang ada. Semua jenis pengusahaan air dan kedaulatan air tertinggi terletak pada rakyat. Rakyat sebagai elemen dasar dari suatu negara/wilayah di setiap pemerintahan menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu pemerintahan, tak terkecuali pengusahaan sumber daya air yang kini menjadi permasalahan di Kabupaten Tuban. Penguasaan kedaulatan air di negara selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa BUMN/BUMD mempunyai kekuasaan penuh untuk mengusahakan sumber daya air. BUMD memiliki hak dan wewenang untuk menerapkan kebijakan tentang pengusahaan sumber daya air yang ada di setiap daerahnya masing-masing.

Kedaulatan masyarakat atas air yang termuat dalam PP No.121 Tahun 2015 diperkuat dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Tuban No.5 Tahun 2017 menjelaskan tentang peningkatan fasilitas sosial untuk peningkatan kebutuhan masyarakat seperti pembuangan limbah, pengolahan air dan jaringan air bersih, dan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian dan

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pasal 2 dan Pasal 10.

kesejahteraan masyarakat¹². Selaras dengan penjelasan PP No.121 Tahun 2015 yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kebutuhan masyarakat atas air merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara baik dan merata.

Terkait dengan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air yang membahas kedaulatan air, sampai saat ini masyarakat Tuban sebagai komponen utama dalam pengusahaan sumber daya air masih belum memiliki akses yang tinggi kepada pemerintah. Sehingga permasalahan air bersih menjadi masalah tahunan setiap musim kemarau karena terhambat pola administratif di beberapa daerah. Pelibatan masyarakat Tuban khususnya masyarakat yang terkena langsung dampak dari krisis air bersih karena sistem pengusahaan sumber daya air yang masih belum maksimal sampai saat ini masih kurang, hal itu dikarenakan kurangnya antisipasi dari beberapa masyarakat dan kurangnya intensitas komunikasi antara kedua belah pihak, baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat.

2.1.3 Konsep Pengusahaan Sumber Daya Air

Semua air terkunci ke dalam proses daur ulang yang disebut daur hidrologi. energi matahari, terutama di daerah tropis menguapkan air dari permukaan laut kemudian mengisi massa udara di atas dengan jumlah besar yang berisi uap air¹³. Air berasal dari mata sumber (dalam tanah), air di laut dan curah hujan. curah

¹²Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pasal 1.

¹³Wagner, H. Richard. Environmesnt and Man. Library of Congress Catalog Card No. 74-141581. Hlm 94.

hujan yang telah jatuh dapat dikontrol sampai batas tertentu oleh berbagai praktek manajemen¹⁴.

Pengusahaan sumber daya air merupakan usaha yang dilakukan untuk mengusahakan, mengolah dan mengatur sumber daya air yang ada untuk dimaksimalkan guna memenuhi kebutuhan rakyat atas kebutuhan sehari-hari. Menelaah PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di kabupaten Tuban sendiri, sampai saat ini belum dapat dikatakan maksimal. Namun mulai Tahun 2017, dalam menyikapi permasalahan air bersih pemerintah bekerja sama dengan PDAM & Organisasi Perangkat Desa (OPD) untuk mengirim atau mendistribusikan air kepada daerah-daerah yang terkena dampak krisis air bersih. Selain itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Tuban bekerjasama dengan Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi (HIPPAMS) untuk memaksimalkan pengelolaan air minum di pedesaan. Namun ketua Asosiasi HIPPAMS Ronggolawe (ASPAROW) Kabupaten Tuban, M.Sulton mengatakan bahwa manajemen pengelolaan menjadi kendala. Rata-rata pengelolaan HIPPAMS di pedesaan masih lemah segi administrasi, keuangan dan hal yang menyangkut pengelolaan air minum¹⁵.

Sebelumnya, pada peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tuban yang menjelaskan tentang perlindungan mata air di pasal 6 peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 menegaskan bahwa mata air adalah sumber daya alam yang

¹⁴ Wagner, H. Richard. Environment and Man. Library of Congress Catalog Card No. 74-141581. Hal 94.

¹⁵ Kabartuban.com <http://kabartuban.com/pengelolaan-hippams-dinilaim-kurang-maksimal/16921> diakses Hari Kamis tanggal 2 Maret 2017

mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Peraturan ini memuat pendapat tentang peran sumber mata air bagi kehidupan masyarakat Tuban yang memiliki multifungsi, diantara fungsi tersebut adalah untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat Tuban. Dijelaskan dalam ayat berikutnya di Pasal 6 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2003 yaitu untuk mempertahankan dan melindungi mata air maka kelestarian air harus dijaga dengan cara melakukan pengusahaan penyelamatan air dan pengendalian pengambilan mata air¹⁶.

Selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 yang menjelaskan secara spesifik tentang pengusahaan sumber daya air dan memberikan jaminan bahwa rakyat merupakan barometer tolak ukur keberhasilan dari sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan air terhadap rakyat. Peraturan tersebut kemudian diturunkan lagi dalam peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 tentang peran PDAM Tirta lestari Tuban selaku BUMD Tuban yang melayani penggunaan air bersih dan pemanfaatan sumber daya air oleh masyarakat Tuban.

PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air memuat penjelasannya dalam pasal 30 untuk memberikan akses atau dalam arti tidak menutup fisik pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat. Sebagai komponen penting dalam daerah, masyarakat mempunyai andil untuk melibatkan diri atau ikut serta dalam manajemen pengelolaan sumber daya air di

¹⁶ PERDA Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 6

daerahnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya¹⁷. Terkait dengan yang disebutkan PP Nomor 121 Tahun 2015 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan air bersih dan keterlibatan pihak swasta dalam pengusahaan sumber daya air.

Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Tuban dan HIPPAMS masih melakukan pendataan calon-calon pengguna baru pemakai air minum dan sanitasi di Kabupaten Tuban. Tahun 2018 ini HIPPAMS bekerja sama dengan OPD desa Nguluhan untuk merealisasikan kinerjanya. Pemasangan pipa dan segala keperluan berlangsungnya pemasangan kebutuhan penggunaan air minum dan sanitasi masih dalam tahap proses¹⁸. Pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban dengan adanya PP Nomor 121 Tahun 2015 dapat menjadi pemantik pemerintah untuk mencari solusi atas krisis air di daerah Tuban. Dalam penerapannya, pihak HIPPAMS sekarang mulai bergerak untuk menindak lanjuti permasalahan krisis air bersih yang terjadi di Kabupaten Tuban.

¹⁷PP Nomor 121 Tahun 2015 Pasal 30.

¹⁸Rapat Pembuatan Rencana Kerja HIPPAMS di Balai Desa, Desa Nguluhan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban pada Tanggal 14 November 2017

2.2 Penelitian Terdahulu

1. **Debytho Airlangga Kusuma (2017), Skripsi “Ekologi Politik (Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Probolinggo) Malang, Universitas Brawijaya.** Tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya air di suatu daerah, khususnya kabupaten probolinggo. Studi kasus pada penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan bagaimana cara mengelola sumber daya air. Teori yang digunakan adalah kebijakan publik.
2. **Sukatiman (2009), Tesis “Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Upaya Pelestarian & Peningkatan Wisata Budaya Berwawasan Lingkungan (studi kasus: Kawasan Pengging, Boyolali Jawa Tengah)” Universitas Sebelas Maret Surakarta.** Dilatarbelakngi oleh pembangunan tempat wisata di Kabupaten Boyolali yang menimbulkan permasalahan lingkungan karena limbah yang disebabkan. Tujuannya untuk mengkaji pelaksanaan pembangunan sumber daya air yang tepat guna dan mengindahkan konsep pelestarian lingkungan dengan mengedepankan aspek ekohidrolik. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan.
3. **Rachmawati Dwi Maharani (2014), Skripsi “Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) di Kabupaten Lebak” Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.** Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan gaya hidup sehat

terkait akses air bersih dan sanitasi yang berbasis masyarakat di Kabupaten Lebak. Tujuan penelitian : untuk mengetahui keberhasilan program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Lebak. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk teorinya adalah teori implementasi kebijakan.

4. **Dzulfikar Habibi Jamil (2013), Skripsi “Deteksi Potensi Kekeringan Berbasis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Klaten”** dilatarbelakangi oleh terjadinya kekeringan di Klaten yang menyebabkan kegagalan panen bagi para petani. Tujuannya untuk mengetahui sebaran daerah berpotensi kekeringan di Kabupaten Klaten dengan menggunakan teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografi.

Dari penjabaran beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang implementasi PP No. 121 Th 2015 tentang pengusahaan SDA. Dalam tabel berikut, selain menjelaskan persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya juga akan ditambahkan beberapa referensi dari jurnal yang pada penjelasan sebelumnya hanya menjelaskan tentang skripsi dan tesis. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

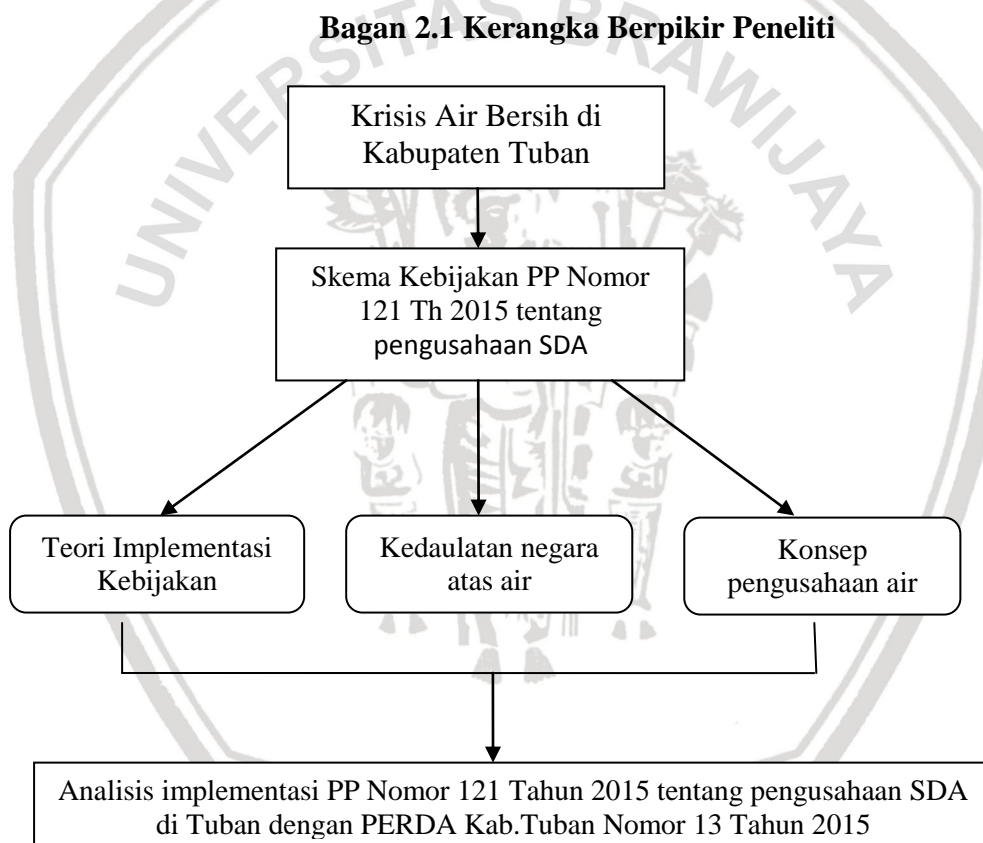
No.	Judul Skripsi/Tesis/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Debytho Airlangga Kusuma (2017), Skripsi “Ekologi Politik (Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Probolinggo) Malang, Universitas Brawijaya.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan hampir sama, yaitu pengelolaan air bersih dari sudut pandang politik.	lokasi penelitian dan upaya pemerintah dalam menanggapi krisis air bersih beserta strategi pemerintah di masing-masing daerah melihat kasus krisis air bersih yang terjadi. Penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan publik, sedangkan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan
2.	Sukatiman (2009), Tesis “Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Upaya Pelestarian	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama	Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada studi

	& Peningkatan Wisata Budaya Berwawasan Lingkungan (studi kasus: Kawasan Pengging, Boyolali Jawa Tengah)” Universitas Sebelas Maret Surakarta.	menganalisis cara mengelola sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat.	kasus dan teori yang digunakan.
3.	Rachmawati Dwi Maharani (2014), Skripsi “Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) di Kabupaten Lebak” Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	sama-sama menganalisis tentang permasalahan air bersih dengan sudut pandang politik	terletak pada studi kasus yang digunakan serta permasalahan yang melatarbelakanginya.
4.	Dzulfikar Habibi Jamil (2013), Skripsi “Deteksi Potensi Kekeringan Berbasis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Klaten”	sama-sama menganalisis kekeringan/ kekurangan pemasok air yang berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar.	pada sudut pandangnya, penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang geografi sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang politik.

5.	Jacobus Samidjo, (2014) Jurnal “Pengelolaan sumber daya air” Semarang.	Membahas bagaimana cara pengelolaan sumber daya air yang baik & menjelaskan urgensi air bagi berlangsungnya kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia	Pembahasan lebih difokuskan pada urgennya air pada kehidupan dan bagaimana cara mengelola air agar tidak berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
6.	Sutoyo, (2010) Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 “ Paradigma perlindungan lingkungan hidup”	Membahas lingkungan hidup dan perspektif lingkungan dan urgensi daya dukung lingkungan untuk keberlangsungan hidup masyarakat	Pisau analisis yang digunakan menggunakan sudut pandang hukum. Titik pembahasan difokuskan pada kelestarian lingkungan secara keseluruhan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran secara garis besar yang menjelaskan logika arah berpikir seorang peneliti dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran peneliti dalam berlangsungnya penelitian implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban yang akan dilaksanakan di lapangan.



Sumber : Diolah dari pikiran peneliti, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode Penelitian kualitatif dalam meneliti “Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air di Kabupaten Tuban”. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial. Dalam arti umum penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sedangkan metode kualitatif menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹

Penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif dipilih peneliti guna mengetahui situasi dan kondisi masyarakat Desa Nguluhan dan desa-desa terdekat sekitar Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan yang terletak diatas ketinggian 100 m dpl terkini yang dalam belitan kekurangan air atau krisis air bersih yang melanda selama bertahun-tahun setiap tiba musim kemarau.

¹Metode Penelitian Kualitatif<http://www.pelajaran.co.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html> Diakses 20 Desember 2017.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian di pemerintahan Kabupaten Tuban seperti PDAM, sekretaris daerah unit kepala perekonomian & sumber daya alam, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengaplikasian implementasi kebijakan PP No.121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Selanjutnya untuk mendapatkan data yang lebih objektif peneliti juga melakukan penelitian di beberapa daerah Kabupaten Tuban, khususnya di daerah dataran tinggi diatas 100 m dpl yang terkena krisis air bersih seperti di Desa Nguluhan, Dusun Dongjero, Desa Guwoterus di Kecamatan Montong. Kemudian Desa Ngandong, Desa Waleran, Desa Gesikan Desa Grabagan di Kecamatan Grabagan. Desa Rengel, Desa Beron Kecamatan Rengel, Desa Gununganyar Kecamatan Soko dan Singgahan.

3.3 Fokus Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban. Sehingga peneliti mengutamakan fokus penelitian dengan bagaimana cara pemerintah dalam mengusahakan sumber daya air bagi daerah-daerah Tuban yang mengalami krisis air bersih dan membutuhkan pengusahaan sumber daya air.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data penelitian mengenai penelitian Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban ini peneliti akan menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data. Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan

(observasi) selain studi dokumentasi. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Burhan Bungin yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan suatu penelitian selama dilapangan, peneliti dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut²

1. Wawancara

Wawancara menjadi cara utama peneliti untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi seputar studi kasus yang dilakukan. Wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka. Untuk jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara semi struktural yang bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam secara intens dan lebih bersahabat dengan informan karena wawancara ini tidak terbatas dengan waktu dan tidak berpatokan dengan wawancara yang tertulis. Jenis wawancara ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam tanpa disadari oleh informan, karena sifatnya yang tidak terlalu terstruktur dan bisa disesuaikan keadaannya sesuai dengan narasumber yang akan diwawancarai.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian apabila sesuai dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan peneliti dan dicatat secara sistematis serta dapat

²Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya Edisi kedua) cetakan ke 8. 2015. Jakarta : Prenadia Media Group, hal 121.

dikontrol keandalan (reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya) sehingga pengamatan dapat menggambarkan keadaan objektif yang diperoleh peneliti.

Peneliti menggunakan observasi sebagai teknik analisis data setelah wawancara karena peneliti tidak ingin bergantung pada data yang diperoleh melalui wawancara saja, namun peneliti juga harus menggali data dan informasi yang terkait implementasi kebijakan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Dalam melaksanakan observasinya peneliti menggunakan jenis observasi tidak struktur. Observasi tidak struktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa *guide*.³ Sehingga dalam observasi ini, peneliti harus mampu mengembangkan pengamatan pada suatu objek penelitian yang didapatkan di lapangan. Pola pikir yang didapat selama di lapangan oleh peneliti harus diolah dan dikomparasikan dengan hasil yang diperoleh pada sesi wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari dan mengamati data dari dokumen yang diperoleh. Dokumentasi dapat menjadi penguat bukti dengan adanya gambaran data melalui *softcopy* maupun *hardcopy*. *Softcopy* disini dapat berupa data dalam kertas secara langsung yang berisi tentang catatan ataupun yang lain. Sedangkan *hardcopy* data dapat berupa elektronik, seperti foto di *handphone* dan segala bentuk data yang berupa elektronik.

³ Jurnal Penelitian Kualitatif, Pupu Saeful Rahmat, Equilibrium. Vol 5 No.9, Januari-Juni 2009: 1-8.

4. Studi Literatur

Studi literatur dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian digunakan untuk mencari referensi teori yang relevan dengan studi kasus. Studi literatur juga digunakan untuk menambah wawasan peneliti terkait pengetahuan data-data penelitian melalui referensi yang didapatkan, baik dari internet, penelitian terdahulu, jurnal maupun buku-buku yang membahas tentang hal yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Pemilihan Informan

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian. Dalam penelitian kualitatif dimungkinkan menggunakan tiga cara dalam pemilihan informan, yaitu prosedur purposif, prosedur kuota dan prosedur bola salju (*Snowball*).⁴

Dalam menjalankan penelitiannya, peneliti menggunakan cara yang pertama yaitu prosedur purposif. Prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.⁵ prosedur purposif

⁴Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya Edisi kedua) cetakan ke 8. 2015. Jakarta : Prenadia Media Group, hal 107.

⁵ Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi kedua), Burhan Bungin. Jakarta : Prenada Media Group, 2007.

dipilih peneliti untuk menentukan informan yang akan diwawancarai. Peneliti akan menggunakan prosedur purposif secara bola salju dalam implementasi kebijakan PP No. 121 Tahun 2015 tentang SDA di Tuban. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi informan dalam penelitian, apabila *list* nama yang dituju peneliti tidak bisa ditemui, dapat diganti dengan informan lain yang sesuai. Berikut adalah nama-nama informan dalam penelitian:

1. Edi Santoso selaku perwakilan Sekretaris Daerah, Unit Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tuban
2. Agus selaku bagian administrasi umum dan kepegawaian Direktur PDAM Tirta Lestari Tuban
3. Wakis selaku perwakilan HIPDAMS Di Daerah yang kekeringan
4. Hardi Sunoto selaku perwakilan OPD yang daerahnya krisis air bersih
5. Masyarakat Tuban, khususnya yang terletak di daerah dataran tinggi dan terkena krisis air bersih seperti di Desa Nguluhan dan sekitar Kecamatan Montong, serta Kecamatan Grabagan.

Nama-nama informan diatas dipilih oleh peneliti karena alasan sebagai berikut:

- a) Sekretaris Daerah, Kabag. Perekonomian dan sumber daya alam sebagai wakil dari pemerintahan Kabupaten Tuban biasanya Sekretaris memiliki peran yang penting untuk berjalannya suatu kebijakan yang langsung berkenaan dengan masyarakat. Selain itu, beberapa kali SEKDA Tuban juga turun langsung ke masyarakat terkait kebijakan di Tuban. Dalam penelitian ini kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam dipilih

peneliti sebagai informan karena cakupan ranah pemerintahan yang tertuju langsung berkenaan dengan pengaruh sumber daya air terhadap perekonomian masyarakat Tuban yang mayoritas berpenghasilan sebagai seorang petani.

- b) Bagian administrasi umum dan kepegawain PDAM Tirta Lestari Tuban dipilih peneliti karena PDAM merupakan pihak yang langsung terlibat dari penerapan kebijakan di daerah Tuban yang menyangkut tentang sumber daya air di masyarakat Tuban. PDAM sebagai perusahaan daerah air minum di Tuban memiliki peranan yang signifikan dalam pengusahaan sumber daya air bagi masyarakat Tuban secara umum.
- c) HIPPAMS dipilih peneliti sebagai informan selanjutnya karena HIPPAMS merupakan pihak yang langsung menangani masyarakat secara langsung dalam permasalahan sumber daya air atau krisis air bersih yang terjadi di Tuban untuk saat ini. HIPPAMS merupakan penghubung masyarakat dengan pemerintah terkait pengadaan dan pengelolaan air bersih di Tuban, HIPPAMS bertugas untuk mendata dan membantu kinerja PDAM ke masyarakat-masyarakat yang daerahnya terkena krisis air bersih.
- d) Hardi Sunoto dipilih peneliti sebagai informan untuk mewakili OPD yang daerahnya terkena dampak dari krisis air bersih yang terjadi di Tuban secara langsung. Namun peneliti juga akan melakukan penelitian ke OPD-OPD lain di daerah yang berbeda untuk lebih menunjang data yang diperoleh selama penelitian di lapangan terkait implementasi PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air.

- e) Masyarakat Tuban, terutama masyarakat daerah dataran tinggi diatas 100 mdpl seperti Kecamatan Montong dan Grabangan. Masyarakat ini dipilih peneliti sebagai informan karena masyarakatlah yang akan menjadi representasi dari sebuah kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah, selain itu masyarakat juga menjadi pihak pertama yang merasakan dampak dari diterapkannya sebuah kebijakan disetiap daerah. Sehingga masyarakat inilah yang menjadi barometer tolak ukur dari keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang diimplementasikan.

3.6 Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data merupakan sumber informasi dan roda utama dalam mendapatkan data-data terkait studi kasus yang diteliti. Sumber data adalah acuan yang digunakan dalam penelitian untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data yang diperoleh peneliti melalui dua data, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri olehpeneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder

adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁶

3.7 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan salah satu dalam tahap proses pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, untuk penelitiannya terkait implementasi PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban, peneliti menggunakan tiga cara, yaitu:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian dan di akhir penelitian. Dalam berlangsungnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, proses pengumpulan data tidak dibatasi oleh astimasi waktu tertentu. Karena penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti terus berjalan selama penelitian berlangsung. Dalam tahap pengumpulan data ini, peneliti akan berhenti melakukan penelitian apabila data yang dibutuhkan dan data-data penunjang terkait informasi penelitian telah terpenuhi, maka berakhir pula masa pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

2. Reduksi data

Reduksi data pada dasarnya merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Dalam hal ini peneliti akan menajdi analisis pertama dari data-data yang diperoleh selama penelitian, baik data yang berbentuk *softcopy*

⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

maupun *hardcopy*, semua akan dianalisis untuk diseragamkan dan disatukan antara kedua data yang telah diperoleh.

3. Kesimpulan Data

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses tahapan data sebelumnya, dari mulai tahapan pertama sampai tahap ketiga. Tahap kesimpulan data merupakan hasil akhir (*final*) dari sebuah penelitian seorang peneliti yang menjurus atau mengerucut pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan untuk mengungkap temuan dari penelitian yang dilakukan selama penelitian di lapangan.

3.8 Validasi Data

Validasi data bertujuan untuk menemukan keabsahan penelitian yang diperoleh melalui teknik pemeriksaan. Keabsahan data akan selalu dikaitkan dengan validasi data suatu penelitian terkait keorisinilan data dan kekuatan suatu data yang didapatkan di lapangan. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar terpercaya dan objektif sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Moleong hal ini dapat dicapai dengan cara:⁷

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

⁷ *Ibid*

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.

Untuk jenis pemeriksaan dalam validasi data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber & triangulasi teori. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek ulang kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda⁸. Sedangkan dalam triangulasi teori, peneliti akan menganalisa semua temuan-temuannya selama menjalankan penelitian di lokasi penelitian, baik berupa data, wawancara dsb yang berhubungan dengan peneliti.

⁸Kusuma, Debytho Airlangga 2017. Skripsi “Ekologi Politik (Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Probolinggo) Malang, Universitas Brawijaya. Hal 35

BAB IV

GAMBARAN UMUM SUMBER DAYA AIR DI TUBAN

4.1 Kondisi Demografi Dan Kebutuhan Air Bagi Masyarakat Tuban

Iklim yang terdapat di Kabupaten Tuban secara fisik seperti wilayah Indonesia pada umumnya, iklim di Kabupaten Tuban juga terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan yang terjadi di Tuban rata-rata berkisar 3.376 mm/tahun¹. Air dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai sektor. Dari sektor ekonomi, air dimanfaatkan oleh kebutuhan rumah tangga, irigasi pertanian, peternakan, perindustrian dan infrastruktur pemerintahan. Di negara-negara agraris, khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya, air merupakan komponen penunjang utama dari keberhasilan panen dari seorang petani. Selain banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, penggunaan air dalam jumlah volume terbanyak oleh masyarakat Indonesia umumnya digunakan untuk sektor pertanian².

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kekeringan atau krisis air bersih merupakan salah satu bencana alam. Dan kekeringan termasuk kategori bencana hidrometeorologis yang harus segera diatasi. Suatu daerah atau wilayah dapat dikatakan kekeringan atau krisis apabila air yang tersedia dalam suatu daerah tersebut jauh di bawah kebutuhan air yang harusnya terpenuhi untuk

¹<http://etheses.uin-malang.ac.id/244/8/08220040%20Bab%204.pdf> Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2018.

²Ika Nurfiana, 2018. Skripsi "Problema Pembagian Air PDAM pada Masyarakat di Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban" Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal 2.

kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan³. Alasan tersebut merupakan bukti bahwa Tuban merupakan daerah krisis air bersih. Hal itu dikarenakan sumber daya air yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atas air secara merata dan kebutuhan air pertanian tidak dapat dipenuhi secara maksimal.

Krisis air bersih akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas air, irigasi pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Sumber daya air yang mempengaruhi bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Tuban dijelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa adanya pengelolaan air dapat memberikan pengaruh pada sistem perekonomian masyarakat Tuban, terutama pada sektor pertanian⁴. Selain jumlah sumber mata air yang tersedia, kondisi demografi suatu daerah yang berada di dataran tinggi juga akan mempengaruhi jumlah ketersediaan air yang dibutuhkan. Wilayah Kabupaten Tuban merupakan daerah yang daerahnya Kabupaten Tuban memiliki wilayah paling Barat dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Secara Geografis Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111°30'-112°35'BT dan 6°40'-7°18'LS.

Sedangkan dilihat dari segi geologi, keadaan tanah di Kabupaten Tuban terdiri dari beberapa macam, yaitu :

³Dwi Hastuti, Sarwono, Chatarina Muryani, Jurnal GeoEco, Vol 3 No.1, Mitigasi, Kesiapan dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bahaya Kekeringan Kabupaten Grobogan. 2017. Hal 48.

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" Kabupaten Tuban.

1) Mediteran merah kuning. Tanah ini berasal dari endapan batu kapur di daerah bukit sampai gunung. Terdapat 38% mediteran merah kuning di wilayah Tuban. Daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah: Kecamatan Semanding, Montong, Kerek, Palang, Jenu, sebagian Tambakboyo Kecamatan Grabagan, Widang, Plumpang, dan Merakurak.

2) Alluvial, tanah ini berasal dari endapan di daerah daratan dan cekungan. Terdapat 34% dari luas wilayah, daerah yang berpotensi alluvial di Tuban, daerah tersebut adalah: Kecamatan Tambakboyo, Bancar, Tuban, Palang, Rengel, Soko, Parengan, Singgahan, Senori dan Bangilan.

3) Grumusol, jenis tanah ini berasal dari endapan batuan di daerah yang bergelombang. Jumlah prosentasi dari daerah Tuban yang memiliki jenis tanah Grumusol hanya 5%. Daerah tersebut adalah : Kecamatan Bancar, Jatirogo dan senori⁵.

Potensi ekonomi dalam masyarakat Tuban terdiri dari beberapa sektor. Berikut adalah potensi ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat Tuban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi tersebut yaitu:

1. Tanaman pangan
2. Perkebunan
3. Perdagangan
4. Hortikultura
5. Perikanan

⁵ Draft Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tuban 2013 II

6. Peternakan
7. Kayu pertukangan dan kayu bakar
8. Industri pengolahan besar dan sedang
9. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga
10. Pariwisata
11. Hotel dan restoran
12. Hasil tambang

Dari 12 sektor tersebut, sampai saat ini sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi sektor unggulan di masyarakat Kabupaten Tuban memperoleh pendapatan ekonomi. Tanaman pangan seperti padi, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok di Tuban, masih mendominasi sistem perekonomian dalam tatanan masyarakat Kabupaten Tuban sampai saat ini. Dan dari tanam pangan tersebut, padi merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari ketiga komoditas lainnya yaitu jagung, kacang tanah dan ubi kayu⁶ yang biasanya ditanam oleh petani Kabupaten Tuban.

Sektor perekonomian yang berkembang di masyarakat Kabupaten Tuban sangat tergantung pada sumber daya air. Menelisik kembali pada PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, bahwa pengusahaan sumber daya air bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat⁷. Dalam sektor perekonomian pada masyarakat Tuban, penerapan PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan

⁶<http://tubankab.go.id/np/profil> Diakses pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 20.50

⁷ PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air

sumber daya air berwujud dalam daya dukung air pada perekonomian masyarakat yang mayoritas mengandalkan sistem pertanian dan perkebunan.

Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam PP No.121 Tahun 2015 tentang adanya tujuan dari pengusahaan sumber daya air bagi masyarakat tidak akan pernah terwujud apabila angka kemiskinan pada masyarakat tinggi akibat kurangnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Elemen paling penting dalam suatu pemerintahan adalah masyarakat, apabila taraf kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (khususnya ekonomi) tidak berjalan, roda pemerintahan dapat dikatakan cacat. Dijelaskan dalam teorinya Edwards tentang implementasi kebijakan publik yang memaparkan bahwa sumber-sumber atau sumber daya yang ada dalam pemerintahan merupakan faktor yang mempengaruhi terlaksananya suatu kebijakan⁸.

Merujuk kembali pada PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, sumber-sumber atau sumber daya yang dikemukakan oleh Edwards berkaitan dengan sumber daya air yang menjadi kunci utama dari tumbuh kembangnya perekonomian di Tuban. Dalam PP No. 121 Tahun 2015 kesejahteraan hidup masyarakat akan terpenuhi apabila sumber daya air dapat terpenuhi, dan terpenuhinya sumber daya air akan berdampak pada sistem ekonomi masyarakat. Sehingga sumber-sumber atau sumber daya (termasuk sumber daya air) harus dapat diusahakan secara maksimal oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Tuban. Hal yang serupa juga dijelaskan

⁸Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 161.

dalam PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu usaha pemerintah Tuban untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pemanfaatan sumber-sumber dan sumber daya (sumber daya alam, air) dalam teori Edwards juga menjelaskan tentang wewenang pemerintah atas suatu program yang akan dijalankan. Dalam menjalankan kebijakan kepada masyarakat, wewenang atas suatu program dapat dilanjutkan, dihentikan, maupun diganti dengan melihat peluang atau situasi yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dana, dan swasta⁹. Dalam pasal 9 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan bahwa air bersih merupakan sarana pelayanan umum pemerintah yang harus dipenuhi untuk menjamin kedaulatan masyarakat atas haknya atas air¹⁰. Dalam peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa adanya peraturan ini adalah untuk menjamin hukum fasilitas umum bagi masyarakat, tak terkecuali sumber daya air yang menjadi urgensi sumber daya di daerah Kabupaten Tuban. Hal itu disebutkan dalam Pasal 2, pasal tersebut menuturkan bahwa pemanfaatan fasilitas umum dijamin dengan hukum yang jelas oleh pemerintah¹¹.

Sejalan dengan PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang mempunyai

⁹Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 164.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pasal 9.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pasal 2.

wewenang atas air untuk mengolah sumber daya air dan mempergunakan air seefisien mungkin guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, penjelasan Edwards dalam teori implementasi kebijakan juga menjelaskan wewenang pemerintah untuk menjalankan suatu program yang direncanakan. Program yang direncanakan pemerintah atas pengusahaan sumber daya air tidak terlepas dari wewenang penuh pemerintah atas air, pemerintah dapat merencanakan program pengeboran sumur tanah, pemasangan air PDAM, pembuatan sanitasi dan pengolahan sumber daya air di sumber mata air serta kebijakan *dropping* air bersih merupakan wewenang yang hanya dimiliki oleh pemerintah selaku pelaksana roda pemerintahan dan pelaksana kebijakan dalam masyarakat. Sehingga sumber daya air di Tuban menjadi hal yang krusial dalam tata kelola pemerintahan dikarenakan sektor ekonomi masyarakat Tuban tergantung oleh air, dan penyumbang pemasukan ekonomi pemerintahan Tuban tidak berjalan tanpa adanya sumber air guna berkembangnya sistem bercocok tanam.

Keberadaan sumber daya air tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, karena air mempunyai *urgensi* yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Air menjadi komponen utama sumber kehidupan manusia setelah oksigen, maka dari itu air yang bersih dan sehat sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan dari suatu daerah atas penanggulangan masyarakat dari kemiskinan dan kesehatan akibat kurangnya sumber mata air di suatu daerah. Berikut adalah manfaat air bersih bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Tuban yang

sebagian besar terkendala dalam pengusahaan sumber daya air. Manfaat air bersih bagi kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Melancarkan perekonomian masyarakat. Sumber daya air yang cukup akan membantu kelancaran ekonomi masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga dan pertanian akan teratasi dengan adanya sumber daya air yang cukup, sehingga ketakutan akan gagal panen tidak akan terjadi dan perekonomian pun tertunjang karena petani tidak harus bergantung pada air hujan saja yang pada satu tahun hanya ada satu musim.
- b. Memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh manusia. Hal ini berguna untuk mencegah dehidrasi akibat kekurangan air dalam kandungan tubuh manusia yang dapat berakibat pada kesehatan.
- c. Menyegarkan badan dan menjaga kesehatan tubuh manusia. Air yang digunakan untuk mandi tidak serta merta menghilangkan rasa capek dan membunuh kuman yang menempel pada tubuh manusia, tapi juga untuk menjaga kesehatan karena tubuh yang kering atau tidak tersiram air secara maksimal akan menyebabkan kulit tidak sehat.
- d. Membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Aktivitas rumah tangga tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya daya dukung dari air untuk mengolah makanan pada masakan mencuci, air minum dll.
- e. Membantu dalam bercocok tanam. Masyarakat Tuban yang pada umumnya berpenghasilan sebagai petani tidak terlepas dari peran air untuk melancarkan usahanya. Fungsi air sangat dibutuhkan untuk tumbuh

kembangnya tanaman yang ditanam di lahan pertanian untuk mendapat hasil panen yang maksimal¹².

Manfaat air bagi kehidupan manusia yang paling terasa adalah manfaat untuk kesehatan dan ekonomi. Dalam PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air telah dijelaskan secara gamblang bahwa air merupakan komponen penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Pengolahan sumber mata air yang maksimal akan berdampak pada keadaan ekonomi pemerintahan tuban secara signifikan yang juga dijelaskan dalam PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015. Hal itu dikarenakan potensi ekonomi yang berkembang di masyarakat Tuban sendiri masih di dominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan.

4.2 Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban

Merujuk pada sistem tata ruang yang ada di Kabupaten Tuban, dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari penataan ruang adalah untuk memadu padankan anantara sumber daya alam, termasuk sumber daya air dengan sumber daya manusia. Yang mana dalam hal itu sumber daya alam memiliki jaminan untuk tetap dilestarikan dan dijaga. Secara Keseluruhan sumber daya alam di Kabupaten Tuban dapat dikatakan baik. Tumbuh kembangnya pariwisata juga menjadi salah satu meningkatnya sumber daya yang ada di Kabupaten Tuban¹³.

¹² Urgensi dan Kegunaan Air <http://ilmugeografi.com> Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2018.

¹³ BPS Kabupaten Tuban Tahun 2013-2017

Secara administrasi kewilayahan Kabupaten memiliki 20 Kecamatan dengan jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 328. Untuk batas-batas wilayah administrasi di Kabupaten Tuban, disebelah utara Kabupaten Tuban merupakan laut Jawa, sebelah Timurnya ada Kabupaten Lamongan, sebelah Selatan Kabupaten Bojonegoro dan sebelah Baratnya adalah Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang berbatasan dengan salah satu Kecamatan di Tuban. Berikut adalah peta administrasi pemerintahan di Kabupaten Tuban.

Tabel 4.1 Nama luas wilayah setiap Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Tuban

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			(Ha)	(%) thd total	(Ha)	(%) thd total
1	Kenduruan	9	8573	4,7	105	2,5
2	Bangilan	14	7727	4,2	189	4,5
3	Senori	12	7839	4,3	140	3,4
4	Singgahan	12	7905	4,3	136	3,3
5	Montong	13	14798	8,0	190	4,6
6	Parengan	18	11445	6,2	195	4,7
7	Soko	23	9688	5,3	303	7,3
8	Rengel	18	5852	3,2	249	6,0
9	Grabagan	11	7379	4,0	159	3,8
10	Plumpang	18	8652	4,7	280	6,7
11	Widang	16	10714	5,8	98	2,4
12	Palang	19	7270	4,0	318	7,6
13	Semanding	17	12099	6,6	346	8,3
14	Tuban	17	2129	1,2	302	7,3
15	Jenu	17	8161	4,4	179	4,3
16	Merakurak	19	10377	5,6	193	4,6

17	Kerek	17	13655	7,4	247	5,9
18	Tambakboyo	18	7297	4,0	141	3,4
19	Jatirogo	18	11198	6,1	180	4,3
20	Bancar	24	11236	6,1	210	5,1
	Jumlah	330	183.994	100	4163	100

Sumber: BPS kabupaten Tuban dalam angka 201-2017

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Kenduruan merupakan Kecamatan yang memiliki Desa/Kelurahan paling sedikit dengan jumlah 9 dan Kecamatan Bancar memiliki jumlah Desa Terbanyak, yaitu 24 Desa/ Kelurahan. Dari 20 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tuban, ada beberapa Kecamatan-Kecamatan sentral yang menjadi pusat perekonomian masyarakat Kabupaten Tuban. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tuban sebagai Kecamatan yang letaknya paling dekat dengan pemerintahan, Kecamatan Jenu dan Kecamatan Tambakboyo sebagai Kecamatan yang dekat dengan perkotaan dan perindustrian, Kecamatan Merakurak sebagai Kecamatan dengan pemasok sumber daya air paling banyak.

Wilayah Kabupaten Tuban memiliki ketinggian daratan yang berkisar antara 0-500 meter diatas permukaan laut (dpl). Pada wilayah bagian Utara dan Selatan administrasi pemerintahan dan wilayah Kabupaten Tuban berupa dataran rendah dengan ketinggian permukaan diantara 0-15 m dpl. Wilayah ini terdapat di sekitar pantai dan sepanjang Sungai Bengawan Solo. Sedangkan daerah yang memiliki ketinggian di atas 100 m dpl di wilayah Kabupaten Tuban terdapat pada Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan. Dua Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah yang daerahnya jarang dilintasi Daerah Aliran Sungai,

khususnya Kecamatan Montong. Jumlah anak sungai kecil yang terdapat di Kecamatan ini juga tidak banyak, dan ketika musim kemarau tiba air yang terdapat pada anak sungai kecil semua akan mengering¹⁴.

Lintasan air atau aliran sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Tuban adalah Sungai Bengawan Solo yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di Pulau Jawa yang mulai membentang dari Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang dan Kecamatan Widang, daerah aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi Kabupaten Tuban mempunyai beberapa Sub DAS. Salah satu sub Das Bengawan Solo terbesar yang ada di Kabupaten Tuban adalah Sub DAS yang terletak di Kali Kening. Sub DAS ini melintas di bagian Selatan Kabupaten Tuban yang membentang mulai dari Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori sampai Kecamatan Parengan. Disamping DAS Bengawan Solo juga terdapat 18 DAS kecil-kecil yang semuanya bermuara ke laut. Berikut adalah DAS yang melintasi daerah Kabupaten Tuban beserta luasannya.

Tabel 4.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tuban

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Bengawan Solo	98.685,61
2	DAS Bancar	1.135,21
3	DAS Boncong	3.356,22
4	DAS Budur	2.850,55
5	DAS Dasin	3.102,15
6	DAS Kaliuntu	598,58
7	DAS Karang	3.801,52

¹⁴Draft Buku Sanitasi Putih Kabupaten Tuban 2013 Hal II-2&3

8	DAS Klero	10.213,21
9	DAS Labuhan	1.813,67
10	DAS Laor Semut	12.596,48
11	DAS Latsari	1.881,85
12	DAS Lengkong	1.0850,2
13	DAS Lohgung	6.386,51
14	DAS Mentoso	2.357,46
15	DAS Prumpung	22.319,14
16	DAS Purworejo	1.694,94
17	DAS Socorejo	2.899,35
18	DAS Tasik Madu	1.250,32
19	DAS Wadung	475,55

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, Tahun 201-2017

Sumber mata air yang terdapat di Tuban selain dari curah hujan dan mata air di dalam tanah adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah aliran sungai merupakan daerah yang letaknya dibatasi dengan bukit atau punggung gunung yang dapat menampung air curah hujan yang jatuh di bumi untuk dialirkan kembali pada anak sungai kecil. Jika kita kembali menelusuri geografis wilayah kabupaten Tuban sendiri, daerah aliran sungai yang luas adalah DAS Prumpung yang letaknya berada diantara tiga Kecamatan. Ketiga Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tamakboyo, Kerek dan Bancar dengan DAS seluas 22.319,14 ha. Analisis neraca air di daerah aliran sungai yang terdapat di Prumpung mengalami defisit air mulai kurun waktu Tahun 2014 sebesar 74.137.662 m³/Tahun. Untuk mencegah defisit yang terjadi, konservasi dipilih sebagai alternatif untuk mengurangi defisit air pada DAS Prumpung Kabupaten Tuban. Program-program

konservasi yang dilakukan adalah pembangunan sumur serapan, teras rorak dan kolam retensi air¹⁵.

Sumber daya alam yang paling terlihat di Kabupaten Tuban adalah sumber daya lautnya. Letak Tuban yang berdekatan dengan laut, karena diselah utaranya berbatasan dengan laut Jawa membuat Kabupaten Tuban tidak kesulitan untuk mendapatkan ikan¹⁶. Selain itu sumber daya alam Tuban seperti hutan dan tanah-tanah pertanian masih terjaga dengan baik, sehingga polusi udara tidak mengganggu aktifitas masyarakat Tuban. Secara umum, seharusnya taidak ada masalah pada sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tuban. Sayangnya sumber daya manusia yang ada masih tidak bisa mengimbangi jumlah sumber daya alam yang tersedia, sehingga keharmonisan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak dapat maksimal.

Sedangkan untuk sumber daya air di Kabupaten Tuban, merujuk pada wilayah administratif Kabupaten Tuban sendiri telah dijelaskan bahwa tidak semua daerah di Kabupaten Tuban terlintasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga daerah dataran tinggi di Kabupaten Tuban mengalami krisis air bersih atau kekeringan karena kurangnya sumber mata air yang terdapat di daerah tersebut dan kurang optimalnya pengusahaan sumber daya air pada masyarakat Tuban sendiri. selain itu, dibeberapa wilayah Kabupaten Tuban dikelilingi bukit kapur, khususnya wilayah dataran tinggi. Hal inilah yang kemudian memicu

¹⁵Shah, Muhammad Syahdan. 2016 Skripsi “Analisis Neraca Air Dan Rancangan Konservasi Sumber Daya Air DiDaerah Aliran Sungai (DAS) Prumpung, Kabupaten Tuban”. Bogor, Institut Pertanian Bogor.

¹⁶Firwanto, Ahmad Agung. Jurnal Wisata Bahari Berbasis Budidaya Ikan Kerapu Di Kabupaten Tuban Hal 1.

beberapa air yang terdapat di Tuban tidak bersih secara sempurna. Endapan yang terdapat di bukit kapur tersebut mempengaruhi kejernihan air pada sumber mata air di Kabupaten Tuban¹⁷.

Sumber daya air merupakan sumber daya yang berbentuk modal alam (*natural resources stock*). Sumber daya jenis ini bergantung pada alam dan berlangsungnya pengaruh alam pada keberadaannya. Sumber daya air yang terdapat di Tubanpun demikian, keberadaan sumber daya air tidak terlepas dari faktor alam. Meskipun secara administratif hanya ada 2 Kecamatan yang disebutkan sebagai daerah dataran tinggi diatas 100 m dpl seperti Kecamatan Grabagan dan Kecamatan Montong, namun beberapa daerah dataran rendah yang letaknya tidak jauh dari bukit kapur airnya juga bermasalah. Secara keseluruhan, mayoritas terjadinya krisis air bersih masih di dominasi daerah dataran tinggi diatas 100 m dpl, sedangkan untuk pengusahaan sumber daya air di beberapa daerah dataran rendah lebih fokus pada warna (kejernihan) dan bau atau tidaknya kondisi air yang ada pada daerah tersebut.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Tuban bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan nelayan. Proporsi terbesar ditempati oleh petani dan peternak. Khususnya di Kecamatan-Kecamatan yang letaknya jauh dari Kabupaten Tuban, seperti Kecamatan Montong, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Grabagan, Kecamatan Parengan dan beberapa Kecamatan lainnya. Pegawai Negeri Sipil, swasta dan profesi lainnya selain petani, peternak dan nelayan di Kabupaten

¹⁷<http://etheses.uin-malang.ac.id/244/8/08220040%20Bab%204.pdf> Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2018

Tuban jumlahnya masih belum seimbang karena sumber daya manusianya yang masih kurang.

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Tuban didominasi dengan sistem pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai profesi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk masyarakat yang berdomisili di sekitar Kecamatan Tuban, Jenu dan Tambakboyo penghasilan masyarakat masih dipengaruhi oleh profesi petani dan masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai pabrik atau industri. Sedangkan untuk Kecamatan lain, terutama Kecamatan Montong, Singgahan dan Kecamatan-Kecamatan ke arah Selatan (arah Bojonegoro) lebih banyak didominasi petani dan peternak.

Nilai guna air semakin tinggi bagi masyarakat Kabupaten Tuban, khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak yang hanya mengandalkan sektor air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, terutama di daerah dataran tinggi seperti di Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan sampai saat ini masih menggantungkan musim hujan sebagai pengairan lahan pertanian karena beberapa Desa di Kecamatan tersebut sumber mata airnya hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan air minum. Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 4 yang menjelaskan peran pemerintah daerah, dalam pengelolaan air adalah PDAM mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Tuban dengan memanfaatkan potensi

sumber daya air¹⁸. Landasan hukum inilah yang kemudian semakin memperkuat kegunaan sumber daya air yang mempunyai nilai tinggi bagi pendapatan asli ekonomi masyarakat Kabupaten Tuban.

Terjadinya ketergantungan curah hujan pada sistem perekonomian, khususnya pendapatan ekonomi dari sektor pertanian di Kabupaten Tuban terutama daerah dataran tinggi diatas 100 m dpl yang tidak terlintasi DAS seperti yang terjadi di Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan berdampak pada tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas air dalam mensejahterakan hidupnya bertolak belakang dengan amanah PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Selain itu penjelasan peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang peran PDAM untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan air minum dan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah¹⁹. Adanya peraturan pemerintah daerah terkait sumber daya air ini adalah untuk menjamin kebutuhan masyarakat atas air di Kabupaten Tuban. Sehingga kebijakan yang diterapkan untuk pengusahaan sumber daya air di daerah krisis air bersih harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerahnya.

¹⁸ PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 4

¹⁹ PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 3

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Tata Kelola Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban

Pemberian izin atas pengusahaan sumber daya air dalam amanah PP No.121 Tahun 2015 dapat diberikan oleh menteri, gubernur dan bupati/walikota. Untuk tingkat provinsi izin melalui menteri, untuk lintas kabupaten perizinan dapat diberikan oleh gubernur dan untuk pengusahaan sumber daya air di suatu Kabupaten atau kota seperti Tuban perizinan dapat diperoleh melalui bupati¹. Sesuai dengan pemaparan isi PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dalam pasal 22 tersebut telah dijelaskan bahwa adanya perizinan pengusahaan sumber daya air hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 22.

Bersangkutan dengan Pasal 22 PP Nomor 121 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang perizinan, selanjutnya dalam Pasal 2 PERDA Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017² juga dijelaskan tentang kejelasan landasan hukum yang jelas tentang air. Perizinan yang tertera dalam peraturan tersebut digunakan untuk menjamin keberadaan sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Tuban. Adanya peraturan ini juga menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam pengusahaan sumber daya air. Tata kelola pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban tidak terlepas dari peran institusi-institusi yang terlibat dalam pengolahan dan pendistribusian air bersih dalam cakupan wilayah pemerintahan.

¹ PP No.121 Tahun 2015 Pasal 22

² PERDA Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2.

Perizinan Bupati selaku pimpinan pemerintah daerah merupakan poin utama dari perizinan tata kelola perusahaan sumber daya air. Dalam hal ini, selaku perwakilan dari pemerintah daerah, sekretaris daerah Kabupaten Tuban di sub kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam yang memonitoring kinerja PDAM selaku perusahaan daerah air minum Tuban yang bertugas untuk menjamin mutu air dan kebutuhan masyarakat atas air.

5.1.1 Institusi-Institusi Perusahaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban

Institusi yang terlibat dalam perusahaan sumber daya air di Tuban sesuai dengan yang tertera diperintah PP No.121 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Perusahaan sumber daya air diterangkan dalam Pasal 13 ayat 2 dapat dilakukan oleh Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha milik swasta. Koperasi, perseorangan atau kerjasama antar badan usaha³. Prioritas dalam perusahaan sumber daya air disuatu Kabupaten atau Kota berada dalam cakupan pemerintah daerah selaku BUMD, dalam hal ini PDAM Tirta Lestari Tuban merupakan salah satu aktor utama dalam perusahaan sumber daya air, kemudian dilanjut oleh badan usaha milik desa atau dalam tata kelola perusahaan sumber daya air di Tuban adalah organisasi perangkat desa kemudian dilanjut swasta yang dilakukan oleh HIPPAMS.

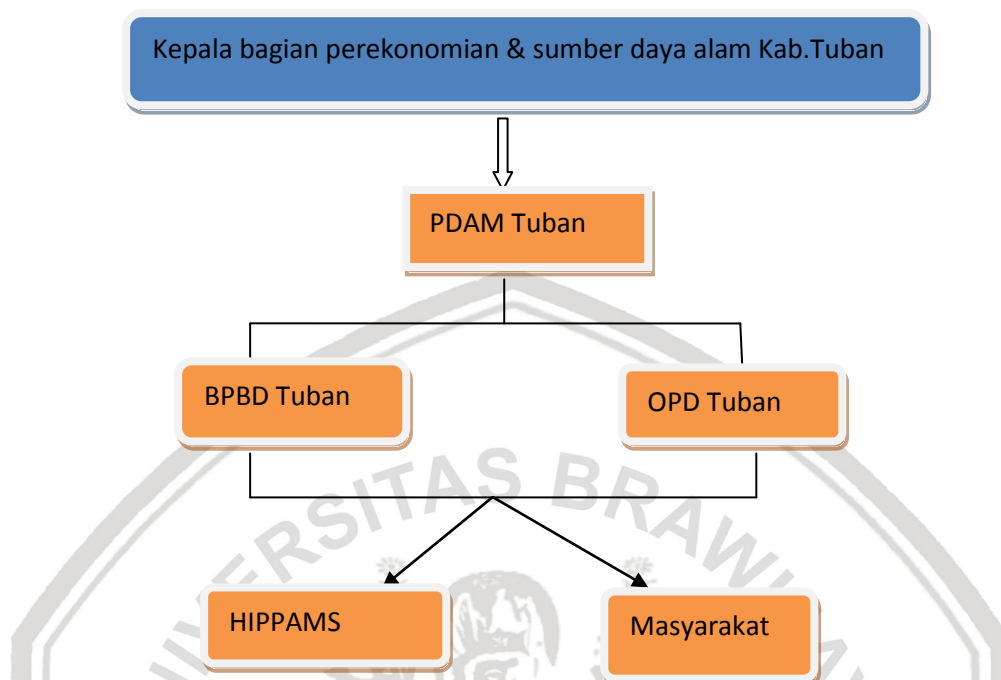
PDAM dalam perusahaan sumber daya air di Tuban mewakili BUMD Tuban sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas pelayanan dan perusahaan air bersih dan air minum daerah Kabupaten Tuban. Peran pemerintah daerah dan PDAM Tirta Lestari Tuban dalam perusahaan sumber daya air

³ PP No.121 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 2

menjadi prioritas utama karena selain disebutkan dalam UUD dan PP Nomor 121 Tahun 2015 juga diperkuat dengan adanya PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menjelaskan bagaimana PDAM mengelola sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat setempat. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah memiliki wewenang atas pengolahan sumber daya air di daerah Tuban untuk mengalokasikan air kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya peraturan yang termuat dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 sudah cukup menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang atas pengolahan sumber daya air di daerah Tuban untuk mengalokasikan air kepada masyarakat. Karena hal tersebut juga telah dijelaskan dalam PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menjelaskan bagaimana PDAM mengelola sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat setempat.

Organisasi perangkat desa (OPD) menjadi bagian penting dalam dalam pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban, dikarenakan OPD merupakan organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kemudian HIPPAMS dalam pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban mewakili pihak swasta dalam mengolah sumber daya air yang ada dalam masyarakat sesuai yang diturunkan dalam pasal 13 ayat 2 setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Berikut adalah struktur hirarki pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban

Bagan 5.1 Struktur Hierarki Pengusahaan Sumber Daya Air di Tuban.



Sumber : Diolah dari pikiran peneliti, 2018

Kepala bagian perekonomian dan sumber daya air Kabupaten Tuban memonitoring kinerja PDAM Tirta Lestari Tuban atas kinerjanya dalam melayani masyarakat dan menjamin hak atas air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Dalam pengusahaan sumber daya air, PDAM Tirta Lestari Tuban bekerja sama dengan BPBD dan OPD untuk mendistribusikan air kepada masyarakat dan mendata wilayah Tuban yang membutuhkan pengusahaan sumber daya air.

Selanjutnya untuk menyeimbangkan proporsi yang maksimal antara pemerintah dan masyarakat, PDAM juga bekerjasama dengan HIPPAMS selaku organisasi yang membantu kinerja PDAM untuk menjalin komunikasi dengan OPD setempat terkait kebutuhan setiap desa dalam Kecamatan yang masih rawan

akan kebutuhan air bersih. Terakhir dalam struktur tersebut adalah masyarakat, yang mana masyarakat dalam implementasi adalah tolak ukur keberhasilan dari kebijakan. Sedangkan dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 masyarakat menjadi barometer utama atas terciptanya peraturan tentang pengusahaan sumber daya air untuk menjamin kesejahteraan dan kedaulatan rakyat atas air.

5.1.2 Kedaulatan Sumber Daya Air Masyarakat Kabupaten Tuban

Merujuk dari isi kandungan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, secara gamblang telah dijelaskan dengan detail bahwa adanya peraturan ini adalah untuk kepentingan rakyat, terutama jaminan rakyat atas kebutuhan air. Sasaran utama dari pengguna air adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Tuban itu sendiri. dari keterangan pemerintah Kabupaten Tuban dan observasi lapangan penelitian yang dilakukan peneliti, berikut adalah alokasi penggunaan air di Kabupaten Tuban, yaitu:

Tabel 5.1 Penggunaan Air Bersih di Tuban

No.	Pengguna atau Pemakai Air Bersih Di Kabupaten Tuban	Prosentase Penggunaan Air Bersih Di Kabupaten Tuban
1.	Pertanian dan peternakan masyarakat	40-45%
2.	Kebutuhan rumah tangga	25-30%
3.	Infrastruktur pemerintahan dan swasta	25-30%
TOTAL		100%

Sumber: Wawancara kepala bagian perekonomian & sumber daya alam Kabupaten Tuban, PDAM Tirta Lestari Tuban, dan observasi lapangan penelitian kurun waktu Mei-Juni 2018.

Pengelolaan air secara bijaksana dalam pengusahaan sumber daya air untuk masyarakat sebelumnya sudah dijelaskan dalam peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa tata pengaturan air adalah segala usaha untuk mengatur, pembinaan seperti kepemilikan, pengusahaan, pengelolaan, penggunaan, penguasaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kelestarian mata air yang terdapat di wilayah Tuban. Pada pasal 4 ayat 1 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 tentang perusahaan daerah air minum “Tirta Lestari” Kabupaten Tuban menerangkan bahwa tujuan pendirian PDAM merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah Tuban dan turut andil dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Tuban dengan adanya pengelolaan air yang baik⁴. Peraturan daerah yang tertera dalam pasal ini semakin memperkuat peraturan pemerintah yang terkandung dalam PP Nomor Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, yang mana air mempunyai peran yang signifikan untuk kesejahteraan hidup masyarakat Tuban.

Selanjutnya pada Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2017 menjelaskan tentang pemanfaatan fasilitas umum kepada masyarakat harus dijamin hukumnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemaksimalan fasilitas yang ada dalam pemerintahan. Fasilitas umum yang dimaksud dalam peraturan tersebut salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya

⁴ PERDA Kabupaten Tuban No. 13 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” Kabupaten Tuban Pasal 4 ayat 1.

yang harus dilindungi, perlindungan sumber daya air sebelumnya telah dijelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Tuban pada pasal 1 ayat 8 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa air bawah tanah merupakan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan fungsi utamanya yaitu untuk melindungi potensi air bawah tanah sebagai sumber mata air maupun daerah resapan air bagi masyarakat⁵.

Kedaulatan masyarakat atas air secara penuh dijamin dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Masyarakat menjadi kunci pokok dari adanya peraturan yang termuat dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 yang menjelaskan bagaimana cara pengolahan sumber daya air. Bahkan dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai andil dalam mengusahakan sumber daya air. Masyarakat mempunyai porsi yang cukup besar dalam amanah PP Nomor 121 Tahun 2015 selain BUMD atau pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mendistribusikan air di daerahnya. Berikut adalah pengolahan sumber daya air di pemerintahan Kabupaten Tuban, pengolahan tersebut adalah sebagai berikut:

⁵ PERDA Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 8

Tabel 5.2 Pengelolaan Sumber Daya Air di Tuban

No	Institusi Pengelola	Prosentase %
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Kepala bagian perekonomian & sumber daya alam, PDAM dan BPBD)	70%
2.	Masyarakat Tuban (Desa Jetak, Gununganyar, Merakurak, Jenu, Tuban dan Singgahan)	10-15%
3.	Swasta (HIPPAMS & Perusahaan swasta, contohnya PT Semen Gresik Tuban. Namun peran perusahaan fokus pada penanaman pohon untuk penyerapan air	15-20%
TOTAL		100%

Sumber: Wawancara Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tuban dan observasi penelitian lapangan bulan Mei-Juni 2018.

Pengolahan sumber daya air di Kabupaten Tuban dikelola pemerintah secara menyeluruh. Prosentasi dari pengolahan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tuban sampai saat ini masih 70% lebih. Sesuai dengan amanah yang tertera dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air bahwa opsi pertama dalam pengusahaan sumber daya air adalah pemerintah. Sehingga prosentase tertinggi dalam pengusahaan sumber daya air ditempati oleh pemerintah, namun poin yang harus diperhatikan dalam amanah PP Nomor 121

Tahun 2015 adalah bahwa perusahaan sumber daya air ditujukan untuk masyarakat, yang mana masyarakat Tuban memiliki hak andil atas perusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban.

Prosentase besarnya pengolahan sumber daya air di Kabupaten Tuban tidak serta merta menjadi penilaian tunggal dari kedaulatan rakyat atas jaminan kebutuhan terhadap air. Hanya saja sampai saat ini, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah bantuan air bersih yang diberikan sebanyak 3 tangki dengan kapasitas 6.000 liter untuk 2 tangki air dan kapasitas 5.000 liter untuk 1 tangki⁶ masih belum dapat untuk menjamin kedaulatan rakyat atas air secara penuh. Kemudian dalam paparan Kepala BPBD juga dilanjutkan bagi desa yang membutuhkan bantuan air, dapat mengajukan permohonan ke pemerintah Kabupaten Tuban. Hal inilah yang sampai saat ini masih belum banyak diketahui oleh OPD-OPD setempat selaku badan yang mengkoordinir dan mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat di desanya. Tidak satu dua saja dalam beberapa desa yang masih tidak tahu akan adanya permohonan untuk distribusi air, sehingga masih ada beberapa desa yang tidak dapat distribusi air.

Tujuan Peraturan Bupati Tuban Nomor 4 Tahun 2011 pada pasal 6 disebutkan bahwa adanya peraturan ini adalah untuk mewujudkan tatanan wilayah yang berfungsi sebagai kawasan mata air, daerah resapan air, air bawah tanah, dan wilayah kawasan konservasi. Adanya peraturan ini dapat ditarik satu garis tentang

⁶Sri Wiyono, Jumlah air yang dibagikan BPBD Tuban <https://kumparan.com/bloktuban/ini-jumlah-air-yang-sudah-dibagikan-bpbd-tuban-27431110790549821> diakses pada tanggal 29 Juli 2018.

perlindungan sumber mata air di Tuban⁷. Sesuai dengan PP Nomor 121 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa adanya peraturan tersebut adalah untuk menjamin kedaulatan rakyat atas air dan adanya jaminan hukum yang jelas atas perizinan pengelolaan sumber mata air. Masih satu benang merah dengan kedua peraturan tersebut, dalam Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 bahwa peraturan yang ada merupakan tujuan pemerintah untuk menjamin hukum atas pemanfaatan fasilitas umum bagi masyarakat Tuban termasuk pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin bahwa pemanfaatan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Pihak swasta dalam perindustrian atau perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam pengelolaan air sampai saat ini masih minim. Peran perusahaan dalam pengusahaan sumber daya air lebih condong pada usaha penanaman pohon untuk cadangan sumber mata air, seperti yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik di Kabupaten Tuban. penanaman pohon dilakukan untuk menjaga ekosistem lingkungan dan penyerapan air tanah. Sedangkan untuk kerjasama dengan non perusahaan, kerjasama yang paling intens dilakukan dengan HIPAMS. Pelibatan pihak swasta dalam pengusahaan sumber daya air di Tuban masih dalam upaya peningkatan pemerintah dalam menerapkan kebijakannya untuk menentukan pihak-pihak yang mendapat perizinan pengelolaan air.

Lamanya perizinan dalam permohonan pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban yang tidak runtut dengan penjelasan PP Nomor 121 Tahun

⁷ PERDA Kabupaten Tuban Nomor 4 tahun 2011

2015 pada pasal 20 yang menerangkan bahwa keputusan untuk memberikan izin pengusahaan sumber daya air dikeluarkan paling lambat empat bulan terhitung sejak permohonan izin atas pengusahaan sumber daya air yang telah diajukan lengkap dengan persyaratannya⁸ sering tidak sesuai dengan estimasi, sehingga pengajuan permohonan pengusahaan sumber daya air oleh masyarakat yang diwakili OPD setempat tidak berjalan maksimal. Lambatnya sistem yang berlaku dalam pengajuan permohonan izin bisa sampai molor satu tahun, seperti yang saat ini terjadi di Desa Nguluhan. Hal inilah yang kemudian membuat kedaulatan rakyat atas air di Kabupaten Tuban belum dapat terpenuhi secara maksimal.

5.2 Indikator Teori Implementasi Kebijakan Edwards Dalam Pengusahaan Sumber Daya Air Di kabupaten Tuban.

Implementasi kebijakan menjadi hal yang penting dalam proses kebijakan publik karena implementasi merupakan wujud dari program-program yang direncanakan dan disusun oleh pembuat kebijakan, tanpa adanya implementasi program-program yang disusun hanya menjadi catatan resmi pembuat kebijakan⁹. Dalam implementasi kebijakan, catatan penting yang harus diperhatikan adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Misalnya birokrasi, organisasi masyarakat, legislatif maupun lembaga peradilan yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Dalam teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edwards, beberapa indikator terlaksananya sebuah implementasi kebijakan adalah

⁸ PP No.121 Tahun 2015 Pasal 20

⁹Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 191.

wewenang, sumber-sumber atau sumber daya dan komunikasi. Ketiga indikator tersebut dapat mempengaruhi kebijakan publik karena melalui wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sumber daya yang ada dalam suatu wilayah pemerintahan termasuk sumber daya air sebagai sumber daya utama dari kebutuhan hidup dan ekonomi dapat terolah dengan baik. dan semua proses tersebut akan berjalan dengan baik, apabila komunikasi yang terjalin terbangun secara baik antara birokrasi pemerintahan Kabupaten Tuban dalam pengusahaan sumber daya air.

5.2.1 Komunikasi Birokrasi Kabupaten Tuban Dalam Pengusahaan Sumber Daya Air

Dalam teori implementasi kebijakan publik Edwards telah dijelaskan bahwa keputusan-keputusan dalam sebuah kebijakan dan segala bentuk perintah yang ada harus diteruskan kepada individu atau personal yang tepat dan sesuai dengan sasaran sebelum semua keputusan dan perintah dalam kebijakan tersebut dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Untuk menjalankan informasi dan menerapkan kegiatan tersebut komunikasi merupakan alat yang menjadi pelaksana dari gagasan keputusan dan perintah yang harus dilanjutkan¹⁰.

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan George Edwards mengenai *urgensi* komunikasi dalam kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi memiliki andil yang cukup signifikan dalam birokrasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terjadi dalam ranah pemerintahan. Tujuan dari adanya komunikasi

¹⁰Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta : CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 156.

dalam birokrasi pemerintahan adalah untuk menjaga informasi dalam suatu pemerintahan yang utuh, berbagi informasi antara birokrat satu dengan birokrat yang lain yang masih satu ranah pembagian kerja, bertukar gagasan atau ide pokok pikiran terkait kebijakan maupun kepentingan rakyat secara luas ¹¹.

Terkendalanya kebijakan pengeboran air tanah, pemasangan sanitasi dan air PDAM serta kurang meratanya sistem *dropping* air bersih pada pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban terletak pada pelimpahan wewenang dan alur komunikasi yang kurang harmonis antara para birokrat pemerintahan Tuban. Jika mengacu pada PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, seharusnya sudah dijelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang yang jelas dalam mengolah pengusahaan sumber daya air Di Kabupaten Tuban. Porsi pemerintah daerah untuk mengurus sumber daya air sudah tertata dengan baik dalam PP Nomor 121 Tahun 2015.

Pembagian ranah kerja yang tepat antar birokrasi pemerintahan Kabupaten Tuban dapat dimaksimalkan dengan pendataan ruang lingkup garis batas kinerja badan-badan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk pengusahaan sumber daya air, seperti PDAM, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tuban, serta beberapa pihak yang bersangkutan seperti BPBD dan OPD selaku penyeimbang kinerja PDAM dalam melayani kebutuhan air bersih di Kabupaten Tuban. Ranah kinerja kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam di pengusahaan sumber daya air Di Kabupaten Tuban meliputi kontroling terhadap kinerja PDAM dan ikut serta membantu melayani masyarakat dalam

¹¹Ulber, Silalahi. Jurnal Komunikasi Pemerintahan : Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No.1, 2004. Hal 36

menjamin mutu sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Tuban guna memenuhi standarisasi kebutuhan hidup masyarakat secara luas. Pola komunikasi yang bagus dalam sebuah organisasi atau birokrasi pemerintahan akan mempengaruhi seberapa berhasil informasi-informasi terkait kebijakan yang akan diimplementasikan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Garis komunikasi untuk pengusahaan sumber daya air Di Kabupaten Tuban dimulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Desa, HIPPAMS dan berlanjut pada masyarakat Tuban secara menyeluruh. Pengadaan sumber daya air Di Kabupaten Tuban bertumpu pada PDAM Tirta Lestari Tuban selaku perusahaan daerah air minum Kabupaten Tuban yang memiliki wewenang untuk menjamin kebutuhan rakyat atas air, khususnya air minum yang bekerja sama dengan aparat pemerintah yang lain seperti kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam selaku badan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Tuban, termasuk air sebagai sumber daya yang krusial. Dan beberapa elemen pemerintahan lain yaitu BPBD, OPD, HIPPAMS dan masyarakat sebagai implementasi dari sebuah kebijakan maupun program yang terdapat di suatu daerah.

Untuk mewujudkan kandungan isi PP Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air Di Kabupaten Tuban, kinerja PDAM Tirta Lestari sebagai perusahaan daerah air minum yang bertugas untuk menyediakan dan melayani masyarakat terkait kebutuhan air bersih bekerja sama dengan OPD untuk memaksimalkan relasi dan pelibatan masyarakat di setiap daerah secara

langsung yang kemudian dikoordinir dan dipantau oleh OPD selaku organisasi resmi dari pemerintah untuk mengayomi masyarakatnya, termasuk melayani kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan hidup.

Kesejahteraan hidup masyarakat tidak hanya bergantung pada tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan yang baik. Kesejahteraan hidup masyarakat yang paling berdampak langsung pada pemerintahan adalah kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Apabila kebutuhan ekonomi terpenuhi, maka secara langsung jaminan mutu pendidikan dan kesehatan juga akan terpenuhi karena adanya dana yang dapat digunakan untuk menyokong fasilitas hidup. Dalam infrastruktur pemerintahan sektor ekonomi juga merupakan tolak ukur dari kesuksesan kepemimpinan suatu pemerintahan. Salah satu indikator terimplementasinya kebijakan adalah adanya dana yang cukup untuk menjalankan program-program yang direncanakan pemerintah.

Kebijakan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dapat terimplementasikan dengan baik apabila isi kandungan dalam butiran poin-poin dalam pasal 3 dan 4 dalam PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 terpenuhi. Salah satu poin dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air yaitu pengusahaan sumber daya air oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, hal serupa juga disebutkan dalam PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 dan PERDA Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pengelolaan fasilitas umum, termasuk pengelolaan sumber mata air harus dipenuhi sesuai dengan jaminan hukum yang ada dalam peraturan yang tertera.

Taraf kehidupan rakyat meningkat apabila kebutuhan pokok dan kebutuhan ekonomi tercukupi, daya dukung air sangat berpengaruh besar dalam tumbuh kembangnya ekonomi di Kabupaten Tuban sebagai daerah yang mayoritas didominasi oleh petani. Pelibatan masyarakat secara langsung untuk mengimplementasikan kebijakan pengusahaan sumber daya air sesuai dengan PP Nomor 121 Tahun 2015 dapat dimonitoring OPD masing-masing di setiap daerah.

Tugas OPD untuk melayani masyarakat desanya dan menjalankan roda pemerintahan di desanya masing-masing untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan kebaikan bersama dalam desa, termasuk membantu kinerja pemerintah daerah untuk mengusahakan sumber daya air di Kabupaten Tuban. Pelibatan OPD menjadi hal yang tidak kalah penting, karena OPD di setiap desanya masing-masing itulah yang lebih mengenali potensi sumber mata air yang terdapat di wilayahnya. Namun dari hasil pengamatan dan penelitian peneliti yang dilakukan di beberapa Kecamatan Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan OPD atau yang lebih dikenal dengan sebutan “*pamong deso*” pada masyarakat di sebagian besar Kecamatan-Kecamatan yang terdapat di Tuban masih terkendala dengan sosialisasi dan komunikasi secara intens terkait permasalahan air bersih. Permasalahan tersebut terletak pada kurangnya interaksi OPD dan masyarakat secara umum terhadap permasalahan yang dialami masyarakat.

“Sejauh ini pamong deso belum memberi tahu khalayak umum secara gamblang terkait permasalahan air bersih yang terjadi di Desa ini is, ya yang kumpul di Balai Desa hanya sebagian saja. Dan pemberitahuan

sosialisasi program yang akan diterapkan di Desa pun juga banyak yang tidak tahu, sehingga masyarakat umum tahunya belakangan menjelang program tersebut berjalan. Seperti pemasangan sanitasi dan pipa yang akan dilakukan Tahun ini”¹²

Respon dan partisipasi masyarakat sekitar terkait permasalahan krisis air bersih penggunaan sumber daya air (air yang keruh) juga menjadi salah satu kendala di beberapa kelurahan atau Desa. Data lapangan di beberapa daerah menunjukkan bahwa antara *pamong deso* dan masyarakat di pemerintahan Desa tersebut masih belum harmonis. Disampaikan oleh Kepala Desa Hardi Sunoto bahwa masyarakat masih kurang antusias dalam penanganan krisis air bersih di Desanya.

“Untuk penggunaan sumber daya air, peran masyarakat dan perangkat Desa merupakan kunci dari program-program yang akan diterapkan dalam Desa-Desa atau wilayah yang mempunyai masalah yang sama terkait. Masyarakat harus aktif untuk berinovasi dan mengajukan proposal kepada pemerintah terkait krisis air bersih, air yang keruh dll. Sejauh ini respon masyarakat masih stagnan dalam pembahasan program krisis air bersih”¹³

Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh informan lain terkait komunikasi antara *pamong deso* dengan masyarakat yang tidak sama. Hal inilah yang kemudian menyebabkan penggunaan sumber daya air di Kabupaten Tuban terhambat dan distribusi air tidak merata. Akibat dari kurang harmonisnya alur komunikasi antara OPD dan masyarakat menimbulkan prasangka buruk dan stigma negatif antara satu sama lain. Permasalahan alur komunikasi terkait air bersih di Kabupaten Tuban tidak hanya terjadi dalam satu wilayah saja, berikut adalah penjelasan dari informan terkait distribusi air bersih di wilayahnya.

¹²Karmui, Wawancara peneliti Di Desa Nguluhan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban pada tanggal 19 Mei 2018 Pukul 16. 21

¹³Hardi Sunoto, Wawancara Peneliti Di Desa Nguluhan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban pada tanggal 19 Mei 2018 Pukul 15.40

“Ya sudah biasa mbak air PDAM ga nyala, jadi masyarakatnya saja yang harus antisipasi. Pamong deso sejauh ini juga menilai itu merupakan hal yang sudah biasa terjadi, kadang air sampai tidak nyala 3 hari atau 4 hari. Bagi masyarakat yang mempunyai tandon atau bak mandi yang besar ya harus dipenuhi wadah-wadah yang bisa dibuat untuk menampung air, supaya bisa dibuat jaga-jaga kalau airnya mati tiba-tiba. Misalkan malam airnya nyala, berarti semua wadah harus terisi air. Soalnya biasanya kalau malam nyala pagi sampai sore air kran tiba-tiba bisa mati sampai besok”¹⁴

“Karena sudah terbiasa setiap musim kemarau air agak susah, OPD menganggap itu merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Paling masyarakat berinisiatif untuk menghemat air secara bijaksana saja mbak. Soalnya kalau nunggu perhatian dari OPD ya responnya biasa saja. apalagi disini tidak pakai air PDAM jadi masyarakat ya mengandalkan sanyo dan sumur tanah itu kalau musim kemarau”¹⁵

Dari penjabaran hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masih ada kendala pada alur komunikasi antara OPD dan masyarakat sekitar terkait pengusahaan sumber daya air di daerahnya masing-masing. Namun tidak semua daerah dan wilayah di Kabupaten Tuban terkendala pada sistem komunikasi antara OPD dan masyarakat, beberapa wilayah seperti Di Gunung Anyar Kecamatan Soko untuk pengusahaan sumber daya air sudah berjalan baik sampai saat ini. Melihat realita lapangan tersebut semakin memperjelas bahwa suatu organisasi (dalam hal ini OPD) harus memiliki *Standart Operating Procedures* (SOP) yang bagus untuk menaikkan mutu pemerintahan, sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa OPD tidak melakukan apa-apa atas permasalahan yang terjadi di Desa pemerintahannya.

SOP adalah prosedur-prosedur yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja sebuah organisasi. Edwards menjelaskan bahwa SOP dapat digunakan untuk

¹⁴Noviyanti, Eka Ulfa. Wawancara Peneliti Di Dusun Timang Desa Grabagan Kecamatan Grabagan pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 11.00.

¹⁵Rohmah, Ika Azizatur. Wawancara Peneliti Di Desa Sumberejo Kecamatan Rengel pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 08.43

menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat birokrasi dan organisasi¹⁶, sehingga informasi yang menyebar sinkron antara yang disampaikan oleh komunikator dan yang diterima oleh seorang komunikan. Selain itu adanya SOP yang bagus dan tertata dalam pemerintahan OPD, OPD dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas permasalahan pengusahaan sumber daya air di daerahnya karena sudah memiliki *standart* dan patokan dasar dari rancangan ranah pembahasan yang menjadi *urgensi* di wilayah pemerintahannya.

5.2.2. Wewenang Pemerintah Atas Sumber Daya Air di Kabupaten Tuban

Sumber daya alam erat kaitannya dengan Negara Indonesia. Indonesia disebut sebagai salah satu Negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam kebudayaan serta kaya akan sumber daya alam. Pada alenia ke empat UUD 1945 yang membahas tentang memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dihubungkan dengan pasal berikutnya di UUD 1945 yaitu pasal 33. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sumber daya alam yang ada di negara dapat dikelola oleh pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan rakyat¹⁷.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang penuh atas sumber daya alam yang ada di Indonesia. pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dalam konteks otonomi pemerintah daerah memiliki peluang dan

¹⁶Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta : CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 177.

¹⁷Payadna, Dwi Kerisna dan Wayan Suarba. Jurnal Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (*Tinjauan Yuridis Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*). Hal 2.

kesempatan yang besar untuk memajukan daerahnya dengan potensi sumber daya alamnya. Sehingga pengelolaan sumber daya alam harus mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, tak terkecuali sumber air sebagai sumber utama kehidupan makhluk hidup khususnya bagi keberlangsungan hidup manusia.

Sesuai dengan amanat UUD dan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang perusahaan sumber daya air, pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengolah dan mengatur potensi sumber daya alam dan sumber daya air yang ada pada wilayahnya. Menurut Pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 undang-undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak hanya hubungan secara administratif yang membahas batas wilayah dan potensi suatu daerah, namun hubungan yang dimaksud juga meliputi hak atau wewenang, keuangan dalam pemerintahan, pemanfaatan atau memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya¹⁸.

Penjelasan undang-undang pemerintah daerah ini menjelaskan jika pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih luas untuk memajukan dan mengatur pemerintahan dalam daerahnya. Dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Tuban, pemerintah juga memiliki wewenang penuh untuk mendistribusikan, mendayagunakan dan memanfaatkan air secara optimal untuk

¹⁸Payadna, Dwi Kerisna dan Wayan Suarba. Jurnal Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (*Tinjauan Yuridis Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*). Hal 3.

kesejahteraan rakyat secara umum. Pemerintah yang berwenang dalam sumber daya air di Kabupaten Tuban salah satunya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM adalah salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih dan badan yang mengatur atau mengontrol air minum untuk masyarakat Tuban.

Sesuai dengan isi PP Nomor 121 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh BUMD, selaku badan pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengelola air untuk masyarakat. PDAM Tirta Lestari menjadi BUMD yang memiliki wewenang paling tinggi untuk pengusahaan sumber daya air, hal ini diperkuat dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Tuban No. 13 Tahun 2015 tentang perusahaan daerah air minum "Tirta Lestari" Kabupaten Tuban yang menjelaskan bahwa maksud dari didirikannya PDAM Tirta Lestari termuat dalam Pasal 3 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan dengan menyelenggarakan pengelolaan air minum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tuban¹⁹. Jaminan kesejahteraan air untuk masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan daerah Kabupaten Tuban No.13 Tahun 2015 tidak serta merta tanpa alasan. Aspek ekonomi masyarakat Tuban bergantung pada terpenuhinya kebutuhan air, terutama di sektor pertanian.

PDAM di Kabupaten Tuban menjadi perusahaan daerah yang berperan sebagai sarana penyedia air bersih dan air minum yang kinerjanya diawasi dan

¹⁹ PERDA Kabupaten Tuban No. 13 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" Kabupaten Tuban Pasal 3.

dimonitoring oleh eksekutif maupun legislatif ²⁰. Selain PDAM Tirta Lestari Tuban yang berperan secara langsung sebagai distributor air bersih dan air minum, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tuban juga berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Namun secara kinerja nyata yang berkenaan langsung pada masyarakat Tuban secara umum, andil PDAM dalam pendistribusian air lebih besar sebagai perusahaan daerah yang memiliki wewenang sebagai perusahaan daerah air minum atas masyarakat Tuban. Dalam kinerjanya, sesuai dengan amanat PP Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban, sebagai distributor air terbesar di Tuban PDAM bekerja sama dengan HIPDAMS, BPBD dan OPD untuk menjalin pola komunikasi yang baik antar wilayah yang ada di Kabupaten Tuban.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Tuban dikelola oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan PDAM dan BPBD. Wewenang terbesar berada dalam tangan pemerintah daerah, namun ada satu yang dilupakan dari isi PP Nomor 121 Tahun 2015 dan PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015, yaitu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Tuban. Keikutsertaan masyarakat dan pemaksimalan pihak swasta dalam pengusahaan sumber daya air terutama perusahaan-perusahaan swasta menjadi poin yang harus ditingkatkan dalam pengusahaan sumber daya air. Hal itu dikarenakan dalam penjelasan PP Nomor 121 Tahun 2015 dan PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015

²⁰Ika Nurfiana, 2018.Skripsi “Problema Pembagian Air PDAM pada Masyarakat di Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban” Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal 3.

menjelaskan bahwa dalam pengelolaan air masyarakat adalah komponen utama yang harus diperhatikan kedaulatan dan haknya atas air.

5.2.3. Sumber-Sumber atau Sumber Daya

Daya dukung sumber daya air di Tuban menjadi prioritas utama selain pendidikan, kesehatan, listrik dan jalan raya dikarenakan akses masyarakat terbatas pada sektor pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam implementasi kebijakan, indikator yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah kesejahteraan rakyat secara umum. Sehingga pemasukan perekonomian tidak tersendat dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar karena dana yang dialokasikan untuk kemiskinan dapat berkurang dengan adanya jaminan penuh atas pengusahaan sumber daya air oleh pemerintah sesuai dengan yang termaktub dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air.

Ada dua pendekatan dalam implementasi kebijakan, yang pertama perintah dan pengawasan, dan yang kedua insentif ekonomi²¹. Sumber-sumber atau sumber daya yang ada dalam masyarakat merupakan pendekatan insentif ekonomi. Insentif ekonomi merupakan suatu inisiatif atau rencana yang ada dalam kebijakan untuk mencapai kepentingan ekonomi. Sumber daya yang ada dalam masyarakat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya ekonomi dalam pemerintahan Kabupaten Tuban, terutama sumber daya air. melihat dari potensi ekonomi yang dikembangkan di Kabupaten Tuban, mayoritas masyarakat masih mendapatkan penghasilan pada sektor yang bergantung pada air. seperti

²¹Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 191.

petani, nelayan dan peternak. Pasal 3 dan Pasal 4 PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 secara jelas menerangkan bahwa sumber daya air mempunyai peran penting dalam kemajuan perekonomian²², sehingga adanya PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 diadakan untuk memaksimalkan kinerja PDAM Tirta Lestari Tuban selaku BUMD yang mempunyai wewenang untuk mendistribusikan air bersih dan air minum kepada masyarakat supaya meningkatkan pelayanan fasilitas umum terkait air secara maksimal.

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah tidak akan terlepas dari sumber daya air yang ada, imbas dari tidak sejahteranya kebutuhan masyarakat akibat kekurangan air bersih akan berdampak langsung pada roda perekonomian suatu daerah. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan ekonomi untuk menjalankan pemerintahannya, sehingga sumber daya air menjadi permasalahan yang krusial dalam tatanan pemerintahan. Termuatnya peraturan yang terdapat dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air merupakan inisiasi pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di setiap daerah dengan dijaminnya hak-hak rakyat atas air untuk kesejahteraan hidupnya dan mencapai kebutuhan ekonominya dengan memaksimalkan sumber daya air yang ada secara bijaksana. Hal itu dikarenakan adanya perizinan yang jelas dan ketat oleh pemerintah daerah pada organisasi nmaupun perseorangan yang akan mengolah atau menggunakan sumber daya air.

²²PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 3 dan Pasal 4.

Pemerintah daerah Kabupaten Tuban mengetahui bahwa sumber daya air di Tuban merupakan hak vital yang harus dipenuhi untuk menopang pendapatan ekonomi masyarakat. Program-program untuk pengusahaan sumber daya air pada tahun 2018 juga ditambah untuk memaksimalkan kedaulatan rakyat atas air, namun pengintensifan HIPPAMS gagal dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban, sehingga potensi sumber daya air yang ada tidak dapat terolah dengan baik dikarenakan terhambat pada sistem wewenang dan alur komunikasi yang tidak harmonis antar birokrasi pengusahaan sumber daya air di pemerintahan.

Secara geografis, terdapat 19 daerah aliran sungai yang mengalir di wilayah Tuban. Letak permasalahan sumber daya air yang terjadi di Tuban terdapat pada pola sistem pengelolaan sumber daya air yang tidak diolah secara bijaksana. Bahkan di daerah yang terletak di dataran rendah seperti Desa Maibit Kecamatan Rengel juga mengalami kendala sumber mata air. Akhirnya, pengusahaan sumber daya air di Tuban tidak hanya terjadi di daerah dataran tinggi saja, daerah yang tidak jauh dari sumber mata air seperti Kecamatan Rengelpun juga mengajukan bantuan air bersih. Setahun belakangan, mulai 2017 akhir pemerintah merencanakan opsi-opsi program untuk pengusahaan sumber daya air. Program pemerintah untuk pengusahaan sumber daya air dan meminimalisir jumlah daerah yang mengalami krisis air bersih salah satu diantaranya adalah pemaksimalan jenset di Kecamatan Soko²³.

²³ Edi Santoso. Wawancara Peneliti di kantor Bupati Tuban pada Tanggal 16 Mei 2018

5.3 Analisis Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Amanah yang terkandung dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dijelaskan bahwa diperlukannya suatu pengaturan dan perizinan alokasi distribusi air ditujukan untuk mengantisipasi ketersediaan air yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah yang semakin bertambah atau berkembang²⁴. Selain dalam PP Nomor 121 Tahun 2015, perizinan dan kepastian hukum fasilitas dan keperluan masyarakat atas air juga dijamin dalam peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017. Kedua peraturan ini dimunculkan untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian air yang adil dan merata bagi masyarakat.

Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2003 dalam kandungan ayat 1 dijelaskan bahwa konservasi mata air merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengelolaan mata air. Hal ini dilakukan menjamin pemanfaatan dan kelestarian lingkungan mata air. Berkenaan dari peraturan daerah yang ada, dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 dijelaskan lagi bahwa pemerintah mempunyai peran dan wewenang untuk pengusahaan sumber daya air, termasuk pengelolaan sumber mata air untuk menjamin kesejahteraan masyarakat atas air. Kemudian dijelaskan lagi dalam turunan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang pentingnya peran sumber mata air dalam kehidupan perekonomian masyarakat Tuban. Sehingga sumber mata air harus mendapat jaminan hukum

²⁴PP No. 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

yang jelas sesuai dengan isi peraturan daerah guna keberlangsungan kebutuhan masyarakat atas air²⁵.

Implementasi kebijakan menjadi hal yang penting dalam proses kebijakan publik karena implementasi merupakan wujud dari program-program yang direncanakan dan disusun oleh pembuat kebijakan, tanpa adanya implementasi program-program yang disusun hanya menjadi catatan resmi pembuat kebijakan²⁶. Dalam implementasi kebijakan, catatan penting yang harus diperhatikan adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Misalnya birokrasi, organisasi masyarakat, legislatif maupun lembaga peradilan yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Untuk itu sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam mengatasi krisis air bersih di daerah dataran tinggi dan pengusahaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Tuban sendiri harus terjalin intens dengan PDAM, HIPPAMS dan OPD pada masing-masing Desa yang terdapat di Kabupaten Tuban.

Perizinan pengusahaan sumber daya air atau izin pengusahaan air tanah dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 disebutkan bahwa yang dapat memberikan izin untuk pengusahaan sumber daya air adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam ranah pemerintahan. Dalam pengusahaan sumber daya air pemerintah diharuskan untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh air yang sehat, bersih, dan produktif guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Disebutkan dalam peraturan daerah Kabupaten Tuban

²⁵ PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015

²⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*), Hal 191.

Nomor 6 Tahun 2003 bahwa mata air merupakan sumber yang muncul secara alamiah dari tanah ke atas permukaan tanah²⁷. Pengambilan air bawah tanah dilakukan melalui pengeboran air bawah tanah atau resapan air.

PDAM Tirta Lestari Tuban selaku eksekutor dalam pengusahaan sumber daya air, seperti yang dijelaskan dalam PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015. Usaha pengelolaan air dapat dilakukan melalui untuk pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian atau pengeboran air bawah tanah atau resapan air. Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dengan adanya PERDA tersebut dapat menjadi penentu dari penerapan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban yang sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal, hal itu dikarenakan masih banyaknya daerah-daerah yang krisis air bersih dan sumber mata airnya keruh.

Data yang ada dalam masyarakat Tuban terkait pengusahaan sumber daya air menunjukkan bahwa sebanyak 37 Dusun dari 26 Desa di 7 Kecamatan wilayah Kabupaten Tuban mengajukan pengadaan air bersih guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Tuban²⁸. Beberapa Desa yang mengajukan pengadaan sumber daya air atau air bersih ini adalah Desa Ngandong Kecamatan Grabagan, Desa Maibit Kecamatan Rengel, Desa Nguluhan Kecamatan Montong, Desa Maindu Kecamatan Montok, Desa Gesikan Kecamatan Grabagan dan beberapa Desa yang terancam kekurangan air bersih.

²⁷ PERDA Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2003

²⁸ Kabar Tuban.com <http://kabartuban.com/kemarau-krisis-air-bersih-tuban-masih-berlanjut/19539>. Diakses pada tanggal 03 Juni 2018.

PDAM Tirta Lestari Tuban selaku perusahaan daerah air minum di Kabupaten Tuban memaparkan bahwa PDAM dan BPBD Kabupaten Tuban sampai hari ini masih mengandalkan sistem *dropping* air bersih untuk daerah-daerah-daerah yang sumber daya airnya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok.

*“Untuk saat ini kita mengatasi krisis air bersih dan pengusahaan sumber daya air dengan sistem Dropping air bersih mbak, untuk usaha lain seperti pembuatan sumur serapan dll juga sudah berjalan. Tapi sebagai solusi pertama kita tetap menggunakan dropping air bersih sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi krisis air bersih di daerah Kabupaten Tuban”*²⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Edi Santoso selaku perwakilan kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam Di Kabupaten Tuban bahwa sistem *dropping* menjadi sistem yang digunakan untuk mengatasi krisis air bersih. Selain itu, upaya pencarian sumber daya air atau pengeboran tanah di suatu daerah juga dilakukan untuk mencari titik tumpu potensi sumber mata air di suatu daerah.³⁰

Kebijakan *dropping* air bersih untuk masyarakat Kabupaten Tuban yang terkena krisis air bersih tidak dapat menjamin keberhasilan pengusahaan sumber daya air bagi wilayah yang sumber mata airnya kurang. Dalam data terbaru BPBD diterangkan bahwa ada 7 Kecamatan yang terkena dampak krisis air bersih dan 26 Desa³¹. Prediksi BPBD 7 Kecamatan yang paling rawan membutuhkan air bersih adalah sebagai berikut:

²⁹ Agus S. Wawancara Peneliti di kantor PDAM Tirta lestari Tuban pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 08.12.

³⁰ Edi Santoso. Wawancara Peneliti di Kantor Bupati Tuban pada tanggal 16 Mei 2018 Pukul 11.15

³¹ [Surya.co.idhttp://surabaya.tribunnews.com/2018/07/11/dampak-kekeringan-petugas-bpbd-tuban-mulai-distribusikan-air-bersih-ke-sejumlah-desa](http://surabaya.tribunnews.com/2018/07/11/dampak-kekeringan-petugas-bpbd-tuban-mulai-distribusikan-air-bersih-ke-sejumlah-desa) Diakses pada Tanggal 16 Juli 2018.

- a. Kecamatan Grabagan
- b. Kecamatan Semanding
- c. Kecamatan Senori
- d. Kecamatan Parengan
- e. Kecamatan Kerek
- f. Kecamatan Bangilan
- g. Kecamatan Jatirogo

Kepala BPBD menghimbau masyarakat berhemat air, mengingat musim kemarau akan segera tiba. Diperkirakan jumlah Kecamatan yang membutuhkan dropping air bersih bisa bertambah apabila penggunaan air tidak digunakan secara bijaksana, karena prediksi musim kemarau akan jatuh pada Bulan Agustus mendatang ³². Kecamatan yang berlangganan mendapat distributor air bersih selain ketujuh Kecamatan diatas adalah Kecamatan Montong. Data pada Tahun 2018 terkait pendistribusian air bersih berkurang 10 Desa jika dilihat dari Tahun 2017 lalu. Pada Tahun 2017, data BPBD menyebutkan bahwa ada 36 Desa yang membutuhkan distribusi air bersih. Pemerintah Kabupaten Tuban berharap dengan adanya penerapan kebijakan saat ini dapat mengurangi kurangnya air bersih dan pengusahaan sumber daya air dalam masyarakat.

Analisis dari implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 yang dapat berjalan dengan baik dari indikator-indikator teori George Edwards adalah sumber-sumber atau sumber daya. Secara langsung pemerintah daerah menyadari potensi air di Tuban sangat mempengaruhi pendapatan perekonomian masyarakat Tuban.

³²Khoirul Huda, blokTuban.com <https://kumparan.com/bloktuban/bpbd-himbau-mulai-saat-ini-masyarakat-hemat-air-27431110790543878> diakses pada tanggal 16 Juli 2018

kesadaran pemerintah akan pentingnya sumber daya air sudah dijelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang memaparkan bahwa adanya peraturan tersebut adalah untuk membantu pendapatan asli daerah yaitu sistem pertanian melalui pengelolaan air secara maksimal.

Intensif ekonomi dalam kebijakan publik yang dilatarbelakangi oleh pendapatan asli daerah dan potensi perekonomian yang dikembangkan masyarakat umum secara keseluruhan bergantung pada air, dan pemerintah menyadari akan hal itu. Sehingga pendanaan khusus untuk krisis air dikhususkan, namun kendalanya adalah pemerintah tidak mampu memaksimalkan wewenang atas sumber daya air dan komunikasi birokrasi secara maksimal sehingga berdampak pada jumlah daerah yang didata BPBD bahwa ada 7 Kecamatan yang rawan krisis air bersih. Keikutsertaan masyarakat dan pengelolaan pihak swasta harus disesuaikan dengan regulasi peraturan daerah agar ada keseimbangan pengelolaan sumber daya air antara pihak pemerintah dan masyarakat.

5.4 Alternatif Program Pemerintah Daerah Mengatasi Krisis Air Bersih Dan Pengusahaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Tuban

Penerapan kebijakan yang terdapat di PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban tentang penyediaan sumber mata air, alokasi air secara adil dan pendistribusian secara merata akan dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang akan diterapkan pada proses selanjutnya setelah menelaah kebijakan *dropping* air masih belum berhasil karena tidak bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas air guna memenuhi kebutuhan pokoknya. Program- program yang akan diterapkan pemerintah daerah

Kabupaten Tuban terkait permasalahan pengusahaan sumber daya air adalah sebagai berikut:

1. Pendataan daerah yang memerlukan pengusahaan sumber daya air pada waktu terdekat dengan cara mengintenskan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan OPD-OPD dan HIPAMS Di Kabupaten Tuban.
2. Pencarian sumber mata air atau pengeboran di berbagai wilayah yang memerlukan pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban.
3. Pemaksimalan jenset dan pompa untuk pengeboran sumber mata air di tanah sekitar daerah yang sumber mata airnya kurang.
4. Pembuatan sumur resapan sekitar pemukiman masyarakat yang terkena dampak krisis air bersih di Kabupaten Tuban³³.

Pada opsi alternatif program-program yang akan diterapkan kepada masyarakat terkait pengusahaan sumber daya air untuk tahap selanjutnya ini pemerintah menelaah kembali kandungan isi dari penjelasan PERDA sebelumnya yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 dan peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2015 tentang jaminan hukum pemanfaatan fasilitas air untuk menjamin kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan karena kebijakan yang sebelumnya, yaitu *dropping* tidak berhasil mengatasi pengusahaan sumber daya air, terutama di daerah dataran tinggi.

³³Hasil Wawancara dengan kepala bagian perekonomian dan sumber daya air serta PDAM di Kabupaten Tuban pada tanggal 16-21 Mei 2018.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Indikator teori implementasi kebijakan George Edwards dalam pengusahaan sumber daya air di Tuban ada tiga, yaitu komunikasi birokrasi Kabupaten Tuban dalam pengusahaan sumber daya air, wewenang pemerintah atas sumber daya air di Kabupaten Tuban dan sumber-sumber atau sumber daya. Dari ketiga indikator tersebut, yang dapat terimplementasi dalam sumber-sumber atau sumber daya yang ada. Pemerintah menyadari bahwa sumber daya air sangat berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat Tuban. Hal itu dibuktikan dengan adanya PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air secara bijaksana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Tuban.

Namun dalam komunikasi birokrasi dan wewenang pemerintah atas air tidak terimplementasi dikarenakan komunikasi antar birokrasi kurang intens seperti tidak sampainya informasi terkait kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat. Penerapan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air yang masih mengandalkan *dropping* air bersih tidak dapat mengatasi krisis air bersih yang terjadi, terutama di daerah dataran tinggi seperti Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan. Kepastian hukum dalam PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 dan PERDA Kabupaten Tuban dalam pasal 2 Nomor 5 Tahun 2015 yang menjamin hukum pemanfaatan fasilitas dalam hal ini sumber daya air

diterangkan dengan jelas melalui prosedur perizinan yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan sumber daya air.

Landasan hukum dari peraturan hukum PERDA Kabupaten Tuban tersebut mengalami kendala karena terjadi permasalahan dalam permohonan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh masyarakat yang tertera dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa permohonan perizinan pengusahaan sumber daya air akan diberikan setelah empat bulan rentan waktu dari perizinan juga tidak dapat terimplementasi, hal itu dikarenakan karena lambatnya sistem yang dijalankan oleh pemerintah dalam menangani proses perizinan yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga pengusahaan sumber daya air terhambat dan daerah-daerah Tuban yang terkena krisis air bersih tidak teratasi permasalahannya.

6.2 Rekomendasi

- **Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban**

1. Perizinan permohonan pengusahaan sumber daya air disesuaikan dengan isi Pasal 20 PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air yang menjelaskan bahwa paling lambat perizinan diberikan pemerintah dalam kurun waktu 4 bulan setelah permohonan diajukan.
2. Meningkatkan kinerja PDAM untuk memaksimalkan pengusahaan sumber daya air di Tuban dengan menjalankan amanah yang ada dalam peraturan daerah Kabupaten Tuban No. 13 Tahun 2015 Pasal 3 tentang maksud berdirinya PDAM Tirta Lestari di Tuban adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.

- Mengaktifkan kembali cara-cara pengelolaan sumber daya air Tuban dengan merujuk PERDA Kabupaten Tuban Nomor 6 tahun 2003 dan menjamin hukum penggunaan dan pemanfaatan fasilitas umum disesuaikan dengan isi PERDA Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut disebutkan pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan dengan cara pengeboran air tanah untuk beberapa wilayah Kabupaten Tuban untuk pencarian sumber mata air, terutama di daerah dataran tinggi seperti Kecamatan Grabagan dan Montong.
- **Untuk Peneliti Selanjutnya**
 1. Memperbanyak referensi dan menggali permasalahan yang terjadi di masyarakat Tuban terkait pengusahaan sumber daya air di seluruh daerah Kabupaten Tuban secara merata.
 2. Mempertajam penelitian terkait OPD dan masyarakat terkait permasalahan perizinan pengusahaan sumber daya air secara menyeluruh. Baik di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No. 1 Tahun 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Dan Bagaimana. Universitas Makassar.
- BPS Kabupaten Tuban, Draft Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tuban 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya Edisi kedua)* cetakan ke 8. 2015. Jakarta : Prenadia Media Group.
- Dunn,William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* dalam jurnal Asna Aneta Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No.1 Thn 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo.
- Handayani,Novi. 2010. *Studi Awal Tentang Sistem Penyediaan Air Bersih Di Desa Karangduwur Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo*. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Humaizi, Abdul Aziz. Jurnal. 2013.*Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika*. Provinsi Sumatra Utara. Vol.3, No.1, Juni.
- Ishiyama,John T. dan Marijke Breuning, Terjemahan Tribowo B.S *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad 21* Jilid 2 Cet 1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kusuma, Debytho Airlangga. 2017. Skripsi. "*Ekologi Politik (Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Probolinggo)* Malang. Universitas Brawijaya.
- Lester dan stewart, Op. Cit. Hal 104. Dalam buku Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Sercvice*).
- Nawawi,Hadari.*Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.
- Nugroho,Riant. 2014. *Public Policy : Edisi Kelima*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nurfiana, Ika. 2018.Skripsi "Problema Pembagian Air PDAM pada Masyarakat di Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban" Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Payadna, Dwi Kerisna dan Wayan Suarba. Jurnal Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (*Tinjauan Yuridis Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*).
- Rahmat,Pupu Saeful. *Jurnal Penelitian Kualitatif, Equilibrium*. Vol 5 No.9, Januari-Juni 2009.
- Rapat Pembuatan Rencana Kerja HIPPAMS di Balai Desa, Desa Nguluhan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban pada Tanggal 14 November 2017
- Richard, Wagner H. *Environment and Man*. Library of Congress Catalog Card No. 74-141581.

Samidjo, Jacobus. 2014. *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Jurnal Vol : XXI, No : 1, Maret.

Silalahi, Ulber Jurnal Komunikasi Pemeritahan : Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No.1, 2004.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. Ke 8.

Usman, Husaini, dan Purnomo, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit PT Bumi Aksara : Jakarta.

Wibiwo, Udik Budi. 2013. *Intensitas Peran Aktor Kebijakan Dan Kekuatan Politis Dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik*. Universitas Negeri Yogyakarta. Jural penelitian Ilmu Pendidikan Vol : 6 Nomor 1, Maret.

Winarno, Budi. Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*).

Undang-Undang :

PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

PERDA Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" Kabupaten Tuban.

PERDA Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

PERDA Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Konservasi Air

UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 Tentang Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial.

UU Pemerintah Daerah Tuban Tentang Pengelolaan Air Pemerintah

Sumber Internet :

Huda, Khoirul blokTuban.com <https://kumparan.com/bloktuban/bpbd-himbau-mulai-saat-ini-masyarakat-hemat-air-27431110790543878> diakses pada tanggal 16 Juli 2018

Kabartuban.com. <http://kabartuban.com/pengelolaan-hippams-dinilaim-kurang-maksimal/16921> diakses pada Tanggal 20 Desember 2017.

Metode Penelitian Kualitatif. <http://www.pelajaran.co.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html> Diakses Tanggal 20 Desember 2017

M. Yakub. <http://mediaindonesia.com/news/read/127326/krisis-air-bersih-di-tuban-masih-berlangsung/2017-10-15> Diakses 20 Desember 2017.

Rohman. Halnopantura.comTuban <https://www.halnopantura.com/langganan-musim-kemarau-pemkab-tuban-dinilai-gagal-atasi-kekeringan-air-bersih/> diakses 7 Januari 2017

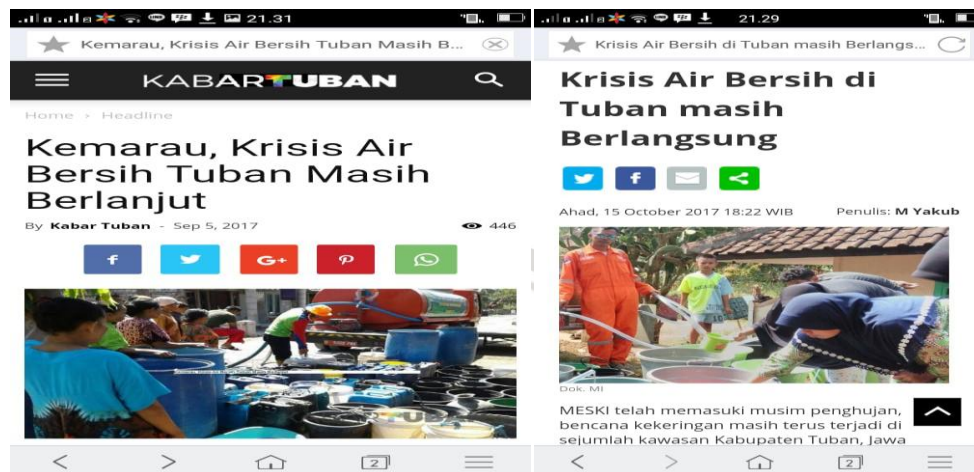
Patrick. <https://www.google.com/search?q=pattrik+http%3A%2F%2Ftanindo.net%2F2016%2F12%2F05%2Fpenyebab-krisis-air-bersih%2F+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> diakses tanggal 20 Desember 2017.

Pengertian Implementasi Kebijakan
<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html?m=1> Diakses 25 April 2018.

Surya.co.id <http://surabaya.tribunnews.com/2018/07/11/dampak-kekeringan-petugas-bpbd-tuban-mulai-distribusikan-air-bersih-ke-sejumlah-desa> Diakses pada Tanggal 16 Juli 2018.



LAMPIRAN



Berita krisis air bersih yang terjadi di Tuban



Sumur di salah satu daerah Tuban yang terletak di daerah dataran tinggi diatas 100 m dpl



Rapat di Balai pembentukan panitia untuk pemasangan sanitasi di Desa Nguluhan dengan OPD dan perwakilan HIPPAMS



Wawancara dengan kepala bagian perekonomian & sumber daya alam kab. Tuban beserta PDAM Tirta Lestari Tuban.



Wawancara masyarakat Tuban dan OPD 2018

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

a. Wawancara Pemerintah Daerah Tuban

1. Apakah air yang tersedia di Kabupaten Tuban sudah bersih dan sehat?
2. Apakah kebutuhan sehari-sehari masyarakat Tuban atas air sudah terpenuhi dengan baik?
3. Seberapa penting air bagi keberlangsungan hidup masyarakat?
4. Dimana saja pemasok sumber air bersih yang ada di Kabupaten Tuban?
5. Apa tanggapan pemerintah tentang krisis air bersih yang terjadi di Kabupaten Tuban?
6. Bagaimana cara pemerintah daerah mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
7. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi permasalahan air bersih yang menjadi masalah tahunan di Kabupaten Tuban?
8. Kebijakan apa yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi permasalahan krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
9. Apakah kebijakan yang telah diterapkan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Tuban?
10. Apakah pemerintah daerah kabupaten Tuban mengetahui isi dari PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air?
11. Bagaimana cara pemerintah menerapkan PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban?

12. Adakah upaya yang dilakukan setelah pemerintah mengetahui isi PP No. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban?
13. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban?
14. Seberapa intens pemerintah daerah berkomunikasi dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Desa terkait permasalahan air bersih di Kabupaten Tuban?
15. Bagaimana cara pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah wilayah yang kekeringan/ krisis air bersih di daerah Tuban supaya tidak bertambah?
16. Kebijakan apa yang direncanakan pemerintah daerah untuk menyikapi permasalahan krisis air bersih di Kabupaten Tuban setelah adanya mandat dari PP no. 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air?
17. Program apa saja yang telah terealisasi dari kebijakan pemerintah daerah terkait krisis air bersih yang terjadi di Kabupaten Tuban?
18. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penyikapan krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
19. Adakah keluhan dari masyarakat Tuban terkait krisis air bersih yang terjadi setiap tahun pada musim kemarau di daerah Tuban?

b. Wawancara PDAM Tirta Lestari Tuban

1. Apakah air yang tersedia di daerah anda sudah bersih dan sehat?
2. Apakah kebutuhan sehari-sehari masyarakat Tuban atas air sudah terpenuhi dengan baik?
3. Seberapa penting air bagi keberlangsungan hidup masyarakat?
4. Dimana saja pemasok sumber air bersih yang ada di Kabupaten Tuban?
5. Apa saja peran PDAM dalam pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban?
6. Bagaimana kinerja PDAM dalam menangani krisis air bersih dan pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban?
7. Apakah PDAM Tuban dalam mengatasi krisis air bersih di Tuban sudah maksimal?
8. Usaha apa yang dilakukan PDAM untuk mengatasi krisis air bersih dan pengusahaan sumber daya air di Tuban?
9. Apa saja yang menjadi kendala PDAM dalam mengatasi krisis air bersih dan pengusahaan sumber daya air di Tuban?
10. Bekerja sama dengan siapa saja selama PDAM mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
11. Strategi apa yang digunakan PDAM Tuban untuk mengurangi daerah-daerah yang terkena dampak krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
12. Bagaimana respon masyarakat terkait kinerja PDAM dalam mengatasi krisis air bersih dan pengusahaan sumber daya air di Tuban?

c. Wawancara HIPPAMS

1. Apakah air yang tersedia di Kabupaten Tuban sudah bersih dan sehat?
2. Apakah kebutuhan sehari-sehari masyarakat Tuban atas air sudah terpenuhi dengan baik?
3. Seberapa penting air bagi keberlangsungan hidup masyarakat Tuban?
4. Dimana saja pemasok sumber air bersih yang ada di Kabupaten Tuban?
5. Apa saja peran HIPPAMS dalam masyarakat terkait krisis air bersih dan pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban?
6. Program apa saja yang sudah dilakukan oleh HIPPAMS dalam masyarakat terkait pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Tuban?
7. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh HIPPAMS kepada OPD dan pemerintah daerah Tuban terkait krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
8. Apakah hasil yang diberikan HIPPAMS kepada masyarakat terkait krisis air bersih yang terjadi di Kabupaten Tuban?
9. Apa saja rencana HIPPAMS kedepannya untuk membantu mengatasi jumlah daerah yang terkena krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
10. Adakah keluhan dari OPD atau masyarakat Kabupaten Tuban kepada HIPPAMS?
11. Apakah susunan kinerja dan rencana yang dilakukan HIPPAMS selama ini sudah terealisasi?
12. Apakah kendala yang dihadapi selama turun langsung ke masyarakat terkait krisis air bersih di Kabupaten Tuban?

13. Bagaimana pendapat anda terkait kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
14. Apakah semua program yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat untuk mengatasi permasalahan krisis air bersih di wilayah Tuban?
15. Bagaimana respon pemerintah terhadap peran dan kinerja HIPPAMS terkait krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
16. Apa usulan anda ke depannya untuk pemerintah kabupaten Tuban dalam penetapan kebijakan yang sesuai terkait krisis air bersih yang terjadi setiap tahun?

d. Wawancara OPD Tuban

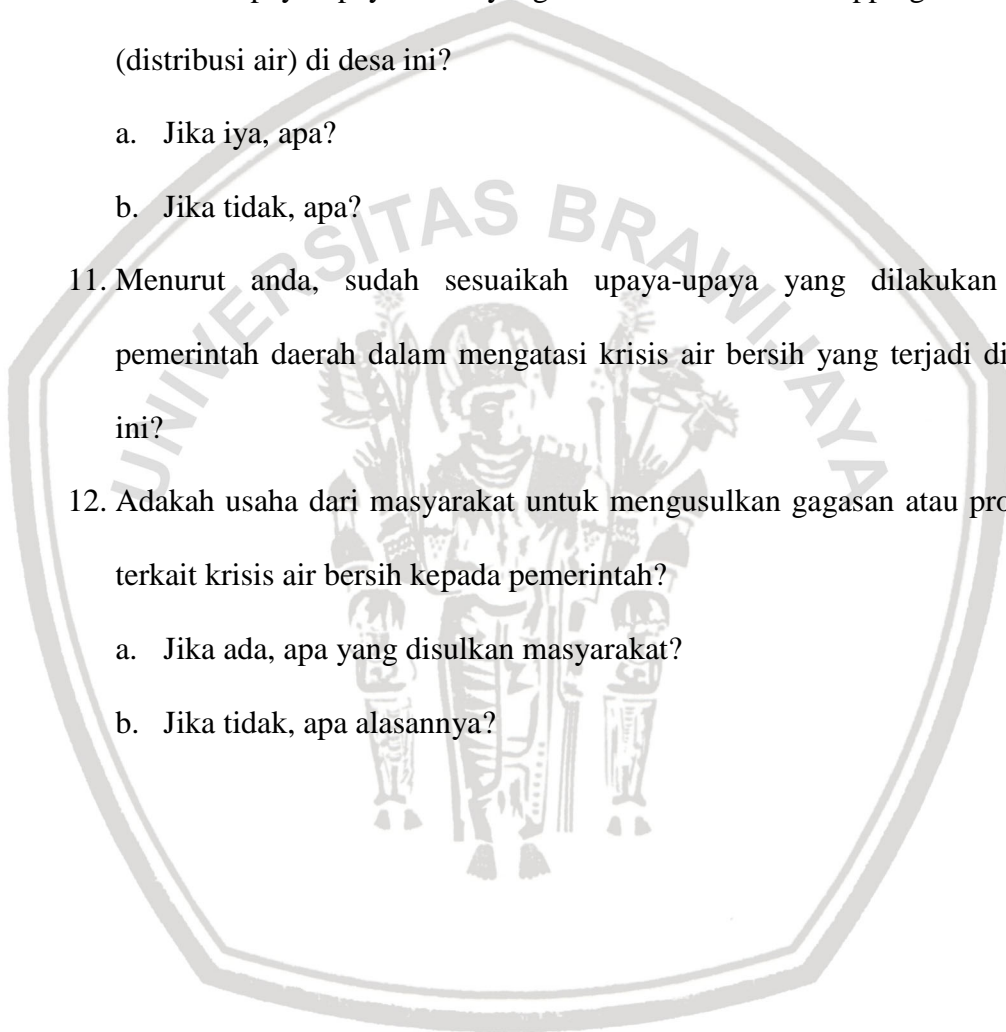
1. Apa saja peran OPD di desa dalam penyikapan krisis air bersih?
2. Adakah kegiatan atau program yang dilakukan untuk menangani krisis air bersih?
3. Adakah masyarakat yang mengusulkan gagasan/pendapat kepada OPD terkait krisis air bersih yang terjadi?
 - a. Jika ada, apa gagasannya?
 - b. Jika tidak, apa alasannya?
4. Bagaimana respon OPD menanggapi permasalahan air bersih yang menjadi masalah tahunan di Kabupaten Tuban?
5. Apakah OPD dilibatkan pemerintah dalam penanganan krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
6. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban untuk mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Tuban?

7. Seberapa intens pemerintah memberikan bantuan atau tindakan terkait permasalahan krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
8. Sudah maksimalkah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Tuban?
 - a. Jika sudah, apa alasannya?
 - b. Jika belum, apa alasannya?
9. Apa saran anda kedepannya untuk pemerintah Kabupaten Tuban terkait permasalahan krisis air bersih yang terjadi di desa anda dan beberapa desa yang sampai saat ini masih terkena krisis air bersih?

e. Wawancara masyarakat Tuban

1. Apakah air yang tersedia di daerah anda sudah bersih dan sehat?
2. Apakah kebutuhan sehari-hari anda atas air di daerah anda sudah terpenuhi dengan baik?
3. Seberapa penting air bagi keberlangsungan hidup masyarakat?
4. Dimana saja pemasok sumber air bersih yang ada di daerah anda?
5. Sejak kapan krisis air bersih terjadi di daerah ini?
6. Apa saja kerugian yang dialami masyarakat dari terjadinya krisis air bersih yang terjadi?
7. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan irigasi, adakah kegunaan air dalam sektor lain dalam kehidupan masyarakat sekitar?

8. Adakah upaya yang dilakukan Organisasi Pamong Desa dalam menyikapi krisis air bersih di desa ini?
9. Apa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam mengatasi krisis air bersih di desa ini?
10. Adakah upaya-upaya lain yang dilakukan selain dropping air bersih (distribusi air) di desa ini?
 - a. Jika iya, apa?
 - b. Jika tidak, apa?
11. Menurut anda, sudah sesuaikah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi krisis air bersih yang terjadi di desa ini?
12. Adakah usaha dari masyarakat untuk mengusulkan gagasan atau program terkait krisis air bersih kepada pemerintah?
 - a. Jika ada, apa yang disulkan masyarakat?
 - b. Jika tidak, apa alasannya?





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. (0341) 575755; Fax (0341) 570038
Website : www.fisip.ub.ac.id Email : fisip@ub.ac.id

Nomor : 1313 /UN10.F11.14.11/PP/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tuban
Di Tempat

Dalam rangka menempuh penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan oleh setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan PPHI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu mengijinkan mahasiswa kami :

Nama : Aisah
NIM : 145120501111025
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Politik
Peminatan : Metode Ilmu Politik
Telp/HP : 085790998618
Judul Skripsi : Implementasi PP No 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air di kabupaten Tuban
Lokasi Penelitian : PDAM Tirta Lestari kab. Tuban
Pemerintah Daerah kab. Tuban
Organisasi Perangkat Desa (OPD) Desa Nguluhan Kec.
Montong kab. Tuban
HIPPAMS Kab. Tuban
Lama Penelitian : Bulan Mei - Juni 2018

Untuk memberikan surat rekomendasi guna melakukan penelitian Skripsi di tempat / daerah / instansi / lembaga tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Malang, 14 Mei 2018
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 197509122005012001

Tembusan :
1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Mastrip No. 21 A Telp. (0356) 321023
TUBAN - 62315

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070 / 232 / 414.205 / 2018

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014;
 2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang Nomor 1313/UN10.F11.14.11/PP/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian nama AISAH.

Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / NIM : AISAH / 145120501111025
b. Alamat : Ds. Nguluhan Kec. Montong Kab. Tuban
c. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
d. Fakultas / Program studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
e. Instansi / Organisasi : Universitas Brawijaya Malang

Untuk Melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan Dengan :

- a. Judul : Implementasi PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air di Kabupaten Tuban.
b. Tujuan : Penyusunan Sripsi
c. Anggota/Peserta : 1 (Satu) orang
d. Waktu : 17 Mei s.d 30 Juni 2018
e. Lokasi : Kabupaten Tuban
- Dengan Ketentuan
1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat kegiatan, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat setempat;
 2. Menjaga Tata Tertib keamanan, ketertiban, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan – perbuatan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;
 3. Pelaksanaan penelitian/survey/kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/survey/kegiatan kepada Bupati Tuban Cq. Kantor Kesbangpol Kabupaten Tuban;
 5. Dalam pelaksanaan Penelitian yang mengikutsertakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Tenaga Ahli / Petugas Lapangan supaya melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resort Tuban;
 6. Rekomendasi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tuban, 16 Mei 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN



Drs. HARI SUNARNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19600516 199203 1 004

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tuban
2. Yth. Komandan KODIM 0811 Tuban
3. Yth. Kepala Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam Kabupaten Tuban
4. Yth. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban
5. Yth. Camat se Kabupaten Tuban
6. Yth. Lurah / Kepala Desa se Kabupaten Tuban
7. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang
8. Yang Bersangkutan.

